

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Riau Tahun 2017 dalam waktu yang singkat dan sesuai dengan yang direncanakan.

Penyusunan Laporan sebagai bentuk petanggungjawaban dan bukti terhadap telah dilaksanakannya kegiatan LAKIP LPMP Riau Tahun 2017. Wujud nyata pertanggungjawaban seluruh kegiatan LPMP dalam manajemen dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan kinerja yang telah dilaksanakan lembaga.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Riau tahun 2017, yang meliputi kinerja atas kegiatan yang terkait dengan kegiatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1) Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 2) Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, 3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan, 4) Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional, 5) Pengembangan dan Pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional, 6) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 7) Pelaksanaan urusan administrasi LPMP. Ketujuh kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan strategis LPMP Riau dan telah melaksanakan berbagai programnya guna merealisasikan target penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja LPMP Riau tahun 2017, serta Rencana Strategis LPMP Riau tahun 2015 – 2019. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja, sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan kualitas laporan ini.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pejabat struktural maupun seluruh pegawai di seluruh unit kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan ini.

Demikian laporan ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Januari 2018
Kepala LPMP Riau

Drs. Mulyatsyah, MM
NIP. 196407141993041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Tugas dan Fungsi LPMP	1
2. Struktur Organisasi	8
3. Fungsi Strategis LPMP	9
4. Permasalahan, Isu, dan Tantangan yang Dihadapi	9
a. Permasalahan	9
b. Isu	10
c. Tantangan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	85
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK 2017)	
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Organisasi LPMP	8
Gambar 3.1. Tampak Muka SIKM LPMP Ver. 1	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Pengukuran IKK LPMP Riau Tahun 2017	17
Tabel 3.2. Tabel Target dan Realisasi SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	20
Tabel 3.3. Capaian Kategori SNP Jenjang SD	23
Tabel 3.4. Capaian SNP Masing-masing Standar	26
Tabel 3.5. Capaian SNP 2016 dan 2017	27
Tabel 3.6. Indeks Efektifitas SD	27
Tabel 3.7. Target dan Realisasi SMP yang Terpetakan Mutunya	28
Tabel 3.8. Capaian Kategori SNP Jenjang SMP	31
Tabel 3.9. Capaian SNP Masing-masing Standar	33
Tabel 3.10. Capaian SNP 2016 dan 2017	34
Tabel 3.11. Indeks Efektifitas SMP	35
Tabel 3.12. Target dan Realisasi SMA yang Terpetakan Mutunya	35
Tabel 3.13. Capaian Kategori SNP Jenjang SMA	38
Tabel 3.14. Capaian SNP Masing-masing Standar	41
Tabel 3.15. Capaian SNP 2016 dan 2017	42
Tabel 3.16. Indeks Efektifitas SMA	42
Tabel 3.17. Target dan Realisasi SMK yang Terpetakan Mutunya	43
Tabel 3.18. Capaian Kategori SNP Jenjang SMK	45
Tabel 3.19. Capaian SNP Masing-masing Standar	48
Tabel 3.20. Capaian SNP 2016 dan 2017	49
Tabel 3.21. Indeks Efektifitas SMK	49
Tabel 3.22. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SD yang Telah di Supervisi dan di Fasilitas dalam Pencapaian SNP	50
Tabel 3.23. Satuan Pendidikan yang Telah di Fasilitas berdasarkan 8 SNP SD	50
Tabel 3.24. Satuan Pendidikan yang Melaksanakan K-13 SD	51
Tabel 3.25. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SD yang Telah di Supervisi dan di Fasilitas dalam Pencapaian SNP 2016-2017	52

Tabel 3.26. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SMP yang Telah di Supervisi dan di Fasilitasi dalam Pencapaian SNP	53
Tabel 3.27. Satuan Pendidikan yang Telah di Fasilitasi berdasarkan 8 SNP SMP	53
Tabel 3.28. Satuan Pendidikan yang Melaksanakan K-13 SMP	54
Tabel 3.29. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SMP yang Telah di Supervisi dan di Fasilitasi dalam Pencapaian SNP 2016-2017	55
Tabel 3.30. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SMA yang Telah di Supervisi dan di Fasilitasi dalam Pencapaian SNP	55
Tabel 3.31. Satuan Pendidikan yang Telah di Fasilitasi berdasarkan 8 SNP SMA	56
Tabel 3.32. Satuan Pendidikan yang Melaksanakan K-13 SMA	57
Tabel 3.32. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SMA yang Telah di Supervisi dan di Fasilitasi dalam Pencapaian SNP 2016-2017	57
Tabel 3.33. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SMK yang Telah di Supervisi dan di Fasilitasi dalam Pencapaian SNP	58
Tabel 3.34. Satuan Pendidikan yang Telah di Fasilitasi berdasarkan 8 SNP SMK	59
Tabel 3.35. Satuan Pendidikan yang Melaksanakan K-13 SMK	59
Tabel 3.36. Capaian PK LPMP Riau Jenjang SMK yang Telah di Supervisi dan di Fasilitasi dalam Pencapaian SNP 2016-2017	60
Tabel 3.37. Penyerapan Anggaran Per Indikator Kinerja	72
Tabel 3.38. Capaian Realisasi Anggaran Per indikator/Sasaran Strategis	76
Tabel 3.39. Capaian Realisasi Anggaran LPM Riau	77
Tabel 3.40. Komposisi Anggaran Pos Belanja LPMP Riau	78
Tabel 3.41. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Bagian LPMP Riau	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017	22
Grafik 3.1. Peta Capaian SNP Jenjang SD Riau Tahun 2017	23
Grafik 3.3. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP	24
Grafik 3.4. Radar Capaian SNP Jenjang SD	25
Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017	29
Grafik 3.6. Peta Capaian SNP Jenjang SMP Riau Tahun 2017	30
Grafik 3.7. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP	32
Grafik 3.8. Radar Capaian SNP Jenjang SMP	33
Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017	37
Grafik 3.10. Peta Capaian SNP Jenjang SMA Riau Tahun 2017	38
Grafik 3.11. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP	40
Grafik 3.12. Radar Capaian SNP Jenjang SMA	40
Grafik 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017	44
Grafik 3.14. Peta Capaian SNP Jenjang SMK Riau Tahun 2017	45
Grafik 3.15. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP	46
Grafik 3.16. Radar Capaian SNP Jenjang SMK	33
Grafik 3.17. Bobot Alokasi berbanding Realisasi Belanja	78
Grafik 3.18. Realisasi Fisik dan Anggaran Per bagian/Bidang	80

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas dan Fungsi LPMP

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat menjadi LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP). Pendirian LPMP ini berawal dari peralihan fungsi Balai Penataran Guru (BPG) Pekanbaru sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (SK Mendiknas) No. 087/O/2003 tentang Organisasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dengan struktur Kepala, Subbag Umum, Seksi Pelayanan Teknis, dan Kelompok Fungsional.

Selanjutnya, pada tahun 2005 diperbarui lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 7 Tahun 2005 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang mengubah kata “Penjamin” menjadi “Penjaminan” sehingga lahirlah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau dengan struktur Kepala, Subbagian Umum, Seksi Data dan Informasi, Seksi Kajian Mutu Pendidikan, Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan terjadinya peralihan fungsi dari BPG menjadi LPMP, maka konsekuensinya terjadi pada tugas pokok, yakni dari sebuah lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan (Diklat) guru menjadi sebuah lembaga penjaminan mutu pendidikan. Perubahan nama ini menuntut terjadinya perubahan pada tupoksi, tujuan, visi, dan misi lembaga. Selain itu, seiring dengan tuntutan otonomi daerah, kegiatan diklat yang selama ini menjadi tugas pokok, kedepan akan diminimalisir karena kewenangan pelaksana diklat menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Sementara tugas pokok LPMP lebih luas dengan konsentrasi pada pemetaan mutu pendidikan, pengembangan dan

pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, supervisi satuan pendidikan serta fasilitasi sumber daya pendidikan.

Seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah dalam hal ini terus mengakomodir upaya-upaya tersebut. Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan berlakunya Permendiknas tersebut, maka berubah pula tugas pokok dan fungsi lembaga. Perubahan ini juga berakibat pada perubahan tingkat eselon lembaga menjadi III.a dengan susunan organisasi yang terdiri dari Kepala, Seksi Program dan Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan, dan Kelompok Fungsional.

Pada tanggal 4 Juni 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengeluarkan Peraturan No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dimana LPMP merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Struktur LPMP terdiri Kepala, Subbag Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Kelompok Fungsional.

Kemudian pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dimana LPMP merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugas dari LPMP Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2015 adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, LPMP Riau juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, LPMP Riau memiliki rincian tugas sesuai Permendikbud No. 59 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja LPMP;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- f. melaksanakan analisis hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;

- j. melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan mutu pendidikan;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
- m. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan LPMP;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan, poliklinik, dan laboratorium LPMP;
- o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LPMP; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan LPMP.

Pelaksanaan rincian tugas tersebut dituangkan dalam rincian tugas seksi dan subbagian sebagai berikut:

1. Rincian tugas Subbagian Umum:
 - a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja LPMP;
 - b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LPMP;
 - c. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran LPMP;
 - d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
 - e. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan LPMP;
 - f. melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai LPMP;
 - g. melakukan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya di lingkungan LPMP;

- h. melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai LPMP;
- i. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan LPMP;
- j. melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
- k. melakukan penyiapan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, izin belajar, dan tugas belajar;
- l. melakukan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya;
- m. melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja LPMP;
- n. melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan LPMP;
- o. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- p. melakukan urusan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip;
- q. melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan LPMP;
- r. melakukan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik LPMP;
- s. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
- t. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan LPMP;
- u. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Lembaga;

- v. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana LPMP;
- w. melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara LPMP;
- x. melakukan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara di lingkungan LPMP;
- y. melakukan urusan penyusunan laporan keuangan di lingkungan LPMP;
- z. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- aa. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan LPMP.

2. Rincian tugas Seksi Sistem Informasi:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. melakukan penyiapan perangkat sistem informasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- e. melakukan validasi data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- f. melakukan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- g. melakukan pemeliharaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- h. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- i. melakukan penyusunan laporan Seksi.

3. Rincian tugas Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;

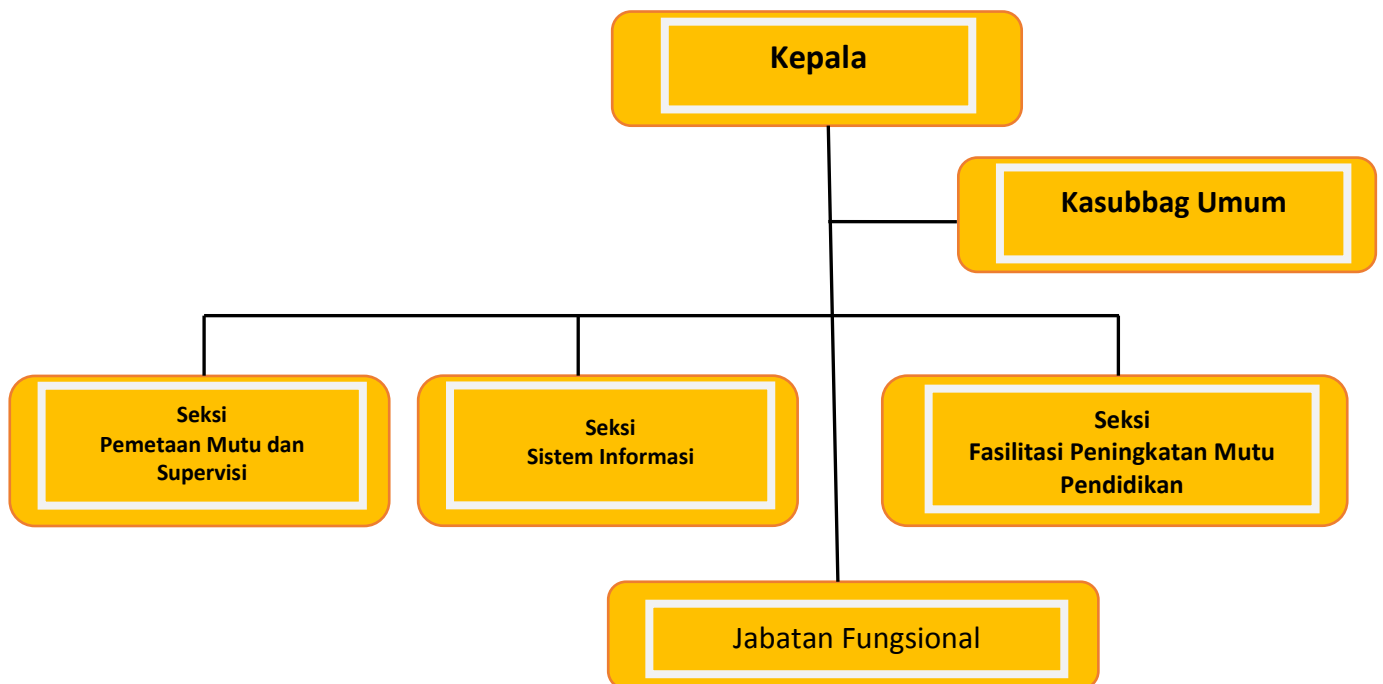
- c. melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - d. melakukan penyusunan bahan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
 - e. melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
 - f. melakukan analisis hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
 - g. melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
 - h. melakukan diseminasi hasil supervisi kepada provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
 - i. melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - j. melakukan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
 - k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
 - l. melakukan penyusunan laporan Seksi.
4. Rincian tugas Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan:
- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
 - b. melakukan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
 - c. melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar nasional pendidikan;
 - d. melakukan penyusunan bahan kerja sama peningkatan mutu pendidikan;

- e. melakukan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- g. melakukan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- h. melakukan pendayagunaan laboratorium LPMP;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- j. melakukan penyusunan laporan Seksi.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LPMP Riau diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2015 dan digambarkan seperti pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 1.1 Bagan Organisasi LPMP Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015.



3. Fungsi Strategis LPMP

LPMP Riau merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk mewujudkan fungsi strategis ini, LPMP Riau melaksanakan beberapa tujuan strategis sebagai berikut:

1. Terpetakannya mutu pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
2. Tercapainya Peningkatan Kualitas Standar Nasional Pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau.
3. Terbentuknya pangkalandata pendidikan untuk setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau
4. Terwujudnya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

4. Permasalahan, Isu, dan Tantangan yang dihadapi

Mempertimbangkan peran strategis pendidikan dalam investasi sumber daya manusia, diyakini bahwa penyelenggaraan pendidikan melalui proses penjaminan mutu yang terencana akan mampu membangun martabat dan daya saing bangsa Indonesia secara bertahap. Proses penjaminan mutu itu sendiri diimplementasikan secara komprehensif dan sistematis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang melibatkan seluruh pelaku pendidikan termasuk LPMP sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi. Upaya strategis penjaminan mutu pendidikan tersebut diwujudkan dengan terbitnya berbagai perundang-undangan yang mendorong keterlaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Dalam mewujudkan penjaminan mutu pendidikan tersebut, berbagai permasalahan, isu, dan tantangan dihadapi oleh LPMP Riau.

a. Permasalahan

- 1) Masih rendahnya kesadaran satuan pendidikan untuk melaksanakan budaya mutu di satuan pendidikan masing-masing;
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di LPMP Riau baik secara kuantitas maupun kualitas;

- 3) Pendanaan untuk fasilitasi peningkatan mutu pendidikan masih belum mencukupi karena kondisi geografis Provinsi Riau yang berada di perairan dan pulau-pulau;
- 4) Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi sehingga akselerasi sekolah tersebut perlu ditingkatkan agar mutu pendidikan menjadi lebih baik dan peningkatan dari akreditasi B menjadi A;
- 5) Masih rendahnya partisipasi/perhatian dari Pemerintah Daerah terutama Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah terutama untuk dukungan penganggaran;

b. Isu

- 1) Alokasi APBD bidang pendidikan di kabupaten/kota diatas 20%;
- 2) Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang terbuka lebar;
- 3) Terjalin hubungan baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- 4) Terbukanya peluang untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- 5) Terbukanya peluang untuk peningkatan Kompetensi dan kualifikasi pegawai untuk kemajuan lembaga

c. Tantangan

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau adalah otonomi daerah. Ketidaksinkronan kebijakan daerah dan pusat, dan perubahan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang bermuatan politis seringkali menjadi hambatan yang perlu disikapi dengan bijaksana oleh LPMP Riau. Akan tetapi tantangan tersebut pada dasarnya juga merupakan peluang besar, yaitu dengan adanya keberadaan LPMP Riau di Provinsi. Peluang untuk melakukan kemitraan dengan daerah menjadi tantangan yang bisa mendatangkan sesuatu yang baru bagi LPMP dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kemdikbud menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010 - 2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Untuk periode tahun 2015-2019, Ditjen Dikdasmen mengarahkan kebijakan perencanaan program melalui restrukturisasi program dan kegiatan serta penganggaran berbasis kinerja pada penguatan layanan yang berfokus pada penjaminan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, LPMP Riau menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Dikdasmen 2015-2019 ke dalam Renstra LPMP Riau, kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Selanjutnya dari dokumen tersebut disusun Kontrak Kinerja antara Kepala LPMP dengan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud, sesuai Permen PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra LPMP Riau disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan berpedoman pada Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut melahirkan delapan indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
2. Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya.

3. Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
4. Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
5. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
6. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
7. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
8. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.

Dari ke delapan indikator kinerja tersebut dirumuskan untuk menghasilkan output, yaitu:

1. SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
2. SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
3. SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
4. SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
5. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.
6. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.
7. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.
8. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.

Pada tabel berikut ditampilkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala LPMP Riau Tahun 2017 dengan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	SD, SMP, SMA, SMK	2.327.607.000
	1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya 2. Persentase SD yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SD)</i>	100 % 40 % 3.683 Sek	1.551.597.000
	3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya 4. Persentase SMP yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SMP)</i>	100 % 50 % 1.120 Sek	471.841.000
	5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya 6. Persentase SMA yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SMA)</i>	100 % 60 % 432 Sek	181.995.000
	7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya 8. Persentase SMK yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SMK)</i>	100 % 50 % 290 Sek	122.174.000
	Persentase Satuan Pendidikan yang telah di supervisi dan fasilitasi berdasarkan 8 SNP	SD, SMP, SMA, SMK	34.961.663.000
	9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	40 %	14.527.323.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	- Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SD)	144 Sek	1.626.820.000
	- Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)	1.280 Sek	12.900.503.000
	10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	40 %	9.550.955.000
	- Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMP)	72 Sek	1.027.467.000
	- Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)	396 Sek	8.523.488.000
	11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	40 %	6.051.019.000
	- Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMA)	42 Sek	727.787.000
	- Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)	148 Sek	5.323.232.000
	12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	40 %	4.832.356.000
	- Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMK)	42 Sek	727.788.000
	- Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)	123 Sek	4.104.568.000

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian kinerja adalah Rp. 37.289.270.000 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang digunakan untuk kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau. Adapun sisa anggaran yang tidak dimasukkan dalam perjanjian kinerja berupa pembiayaan

belanja pegawai dan belanja modal serta sebagian belanja barang untuk layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan serta dokumen data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, ketatausahaan, layanan perkantoran, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran serta gedung dan bangunan. Untuk anggaran secara keseluruhan LPMP Riau dialokasikan sebesar 54.018.559.000 (lima puluh empat milyar delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Besar anggaran yang dialokasikan ini setelah dilakukan efisiensi anggaran, hingga revisi ke tujuh RKAKL DIPA LPMP Riau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, LPMP Riau berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Riau.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau merupakan salah satu layanan penting dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Penjaminan Mutu Pendidikan terhadap satuan pendidikan di seluruh provinsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Dikdasmen tahun 2017 ditetapkan melalui capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPMP. Capaian kinerja untuk 3 (tiga) tujuan strategis LPMP, yaitu:

1. Terpetakannya mutu pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
2. Tercapainya Peningkatan Kualitas Standar Nasional Pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau.
3. Terwujudnya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel

Ketercapaian ketiga tujuan strategis LPMP tersebut diukur dari beberapa IKK LPMP yang menjadi tujuan strategis LPMP dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Tabel Pengukuran IKK LPMP Riau Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kerja		Target			Realisasi			
			Fisik	%	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya		5532	100		5438	98,3		
	1.	1.1.	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya						
			output :						
			SD yang terpetakan mutu pendidikannya	3655	100		3619	99,02	
		1.2.	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya						
			output :						
			SD yang meningkat indeks efektivitasnya	1148	40		3258	90	
	2.	2.1.	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya						
			output :						
			SMP yang terpetakan mutu pendidikannya	1143	100		1118	97,81	
		2.2.	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya						
			output :						
			SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	671	60		982	87,8	
	3.	3.1.	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya						
			output :						
			SMA yang terpetakan mutu pendidikannya	441	100		421	95,46	
		3.2.	Persentase SMA yang						

Sasaran Strategis	Indikator Kerja		Target			Realisasi			
			Fisik	%	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%
		meningkat indeks efektivitasnya							
		output :							
		SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	253	60		351	83,4		
	4.	4.1. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya							
		output :							
		SMK yang terpetakan mutu pendidikannya	234	80		280	95,56		
		4.2. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya							
		output :							
		SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	126	45		249	88,9		

Sumber: Pengukuran Kinerja LPMP Riau tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja LPMP Riau tahun 2017 di atas, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya

Dari 5.473 sekolah yang ada di Provinsi Riau, 5.438 sekolah (98.30%) telah memiliki peta mutu berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data PMP yang terkumpul melalui server pusat. Disamping itu, LPMP Riau di tahun 2017 telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Klinik Mutu (SIKM) yang merupakan pengembangan dari aplikasi Peta Mutu Pusat dengan menambahkan deskripsi *analisis indikator mutu dan rekomendasi pencapaian standar mutu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) di masing-masing satuan pendidikan*. Aplikasi ini juga memberikan informasi rapor mutu sekolah binaan masing-masing pengawas sekolah. Realisasi program ini dapat dilihat pada

alamat <http://lpmpriau.kemdikbud.go.id/klinikmutu>. Berikut tampilan aplikasi Sistem Informasi Klinik Mutu (SIKM) LPMP Riau.



Gambar 3.1. Tampak Muka Sistem Informasi Klinik Mutu (SIKM) LPMP Riau Versi 1

Peta Mutu yang ada pada Sistem Informasi Klinik Mutu (SIKM) LPMP Riau tetap mengikuti mekanisme penskoran dan kategori capaian pemenuhan SNP yang ditetapkan oleh Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, yaitu :

- a. Menuju SNP level 1 : skor < 2.04
- b. Menuju SNP level 2 : $2.04 \leq \text{skor} < 3.70$
- c. Menuju SNP level 3 : $3.70 \leq \text{skor} < 5.06$
- d. Menuju SNP level 4 : $5.06 \leq \text{skor} < 6.66$
- e. SNP : $6.66 \leq \text{skor} \leq 7.0$.

Untuk informasi capaian pelaksanaan peta mutu di masing – masing jenjang satuan Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada rincian di bawah ini :

1.1. Sekolah Dasar (SD)

a. Persentase Sekolah Dasar (SD) yang telah dipetakan mutu pendidikannya

1. Gambaran Umum

Indikator kerja persentase Sekolah Dasar (SD) yang telah dipetakan mutu Pendidikan di Provinsi Riau hampir mencapai target renstra yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Target dan Realisasi SD yang terpetakan mutu pendidikannya

Jumlah Sekolah	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
3655	3655	100	3619	99,02

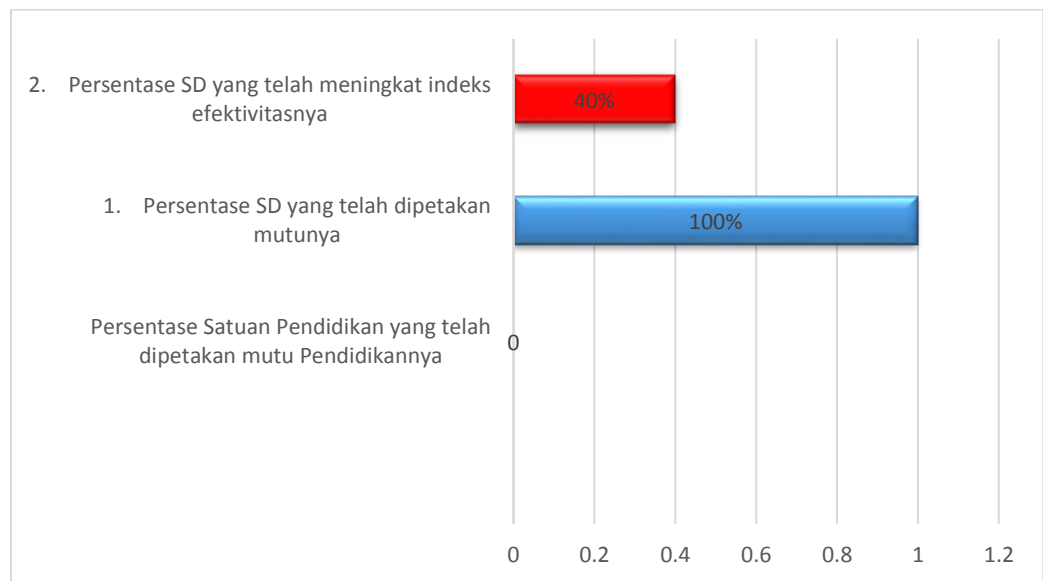
Berdasarkan tabel 3.2. di atas, terlihat bahwa target tahun 2017 sebesar 100% atau 3.655 sekolah. Realisasi capaian tahun 2017 adalah sebesar 99.02% atau 3.619 sekolah. Hal ini menggambarkan masih terdapat 36 sekolah (0.98%) sekolah yang belum terpetakan mutu pendidikannya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Masih terdapat sekolah yang tidak beroperasi, namun masih terdaftar pada aplikasi PMP;
- Terdapat sekolah yang tidak merespon program PMP sehingga tidak melakukan proses pengisian dan pengiriman instrumen. Hal disebabkan oleh kurangnya pemahaman sekolah tentang pentingnya sistem penjaminan mutu Pendidikan (SPMP). Bahkan banyak sekolah yang beranggapan bahwa SPMP hanya sebagai program yang menambah beban tugas sekolah;

- c. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki NPSN sebagai akibat perubahan status dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri;
- d. Terdapat beberapa sekolah yang telah melakukan pengiriman data PMP namun sistem tidak memproses pengolahan peta mutu. Hal ini disebabkan oleh pengisian instrument oleh sekolah tidak lengkap;
- e. Terdapat beberapa sekolah yang tidak bisa melakukan pengiriman data PMP karena jumlah minimal responden tidak terpenuhi;
- f. Respon penerimaan pengiriman data PMP oleh sekolah melalui server pusat masih terkendala, sehingga banyak sekolah yang kesulitan mengirimkan data PMP.

Jika dilihat dari capaian realisasi indikator tahun 2016, capaian tahun 2017 ini sudah menunjukkan peningkatan. Dimana tahun 2016 realisasi SD yang terpetakan mutu pendidikannya sebesar 66.6% atau 2.423 sekolah. Terdapat peningkatan realisasi capaian sebesar 32.6%.

Pencapaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



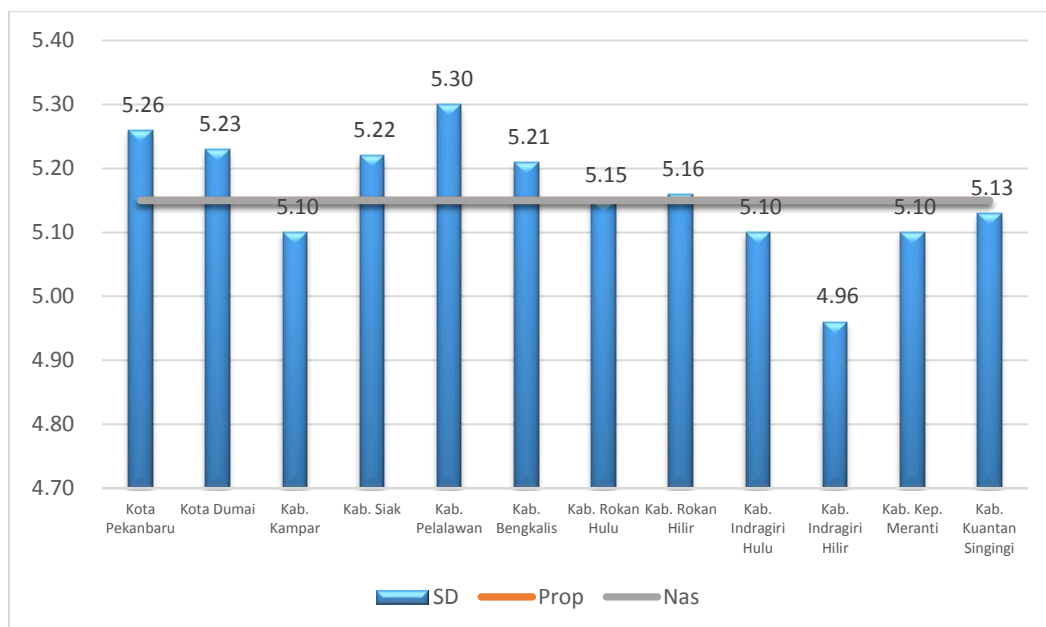
Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017

Keberhasilan ini merupakan wujud dari langkah strategis LPMP Riau Tahun 2017 dalam mengatasi beberapa kendala yang ditemui, diantaranya :

- a. Pembentukan Tim Akselerasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) LPMP Riau;
- b. Pelibatan Pengawas sekolah dan Operator Kecamatan sebagai garda terdepan koodinator petugas pengumpulan data di masing – masing wilayah;
- c. Peningkatan frekuensi dan pola komunikasi koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- d. Pemberian bantuan transportasi local bagi pengawas dalam rangka pengumpulan data PMP ke sekolah binaan;
- e. Pemberian honorarium kepada Operator PMP di tingkat kecamatan sebanyak 163 orang selama 6 (enam) bulan.

2. Capaian Mutu Satuan Pendidikan

Peta capaian mutu jenjang Sekolah Dasar (SD) Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.2. Peta Capaian SNP Jenjang SD Riau Tahun 2017

Skor capaian peta mutu jenjang SD untuk masing – masing kab/kota dipaparkan pada tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.3. Capaian Kategori SNP Jenjang SD

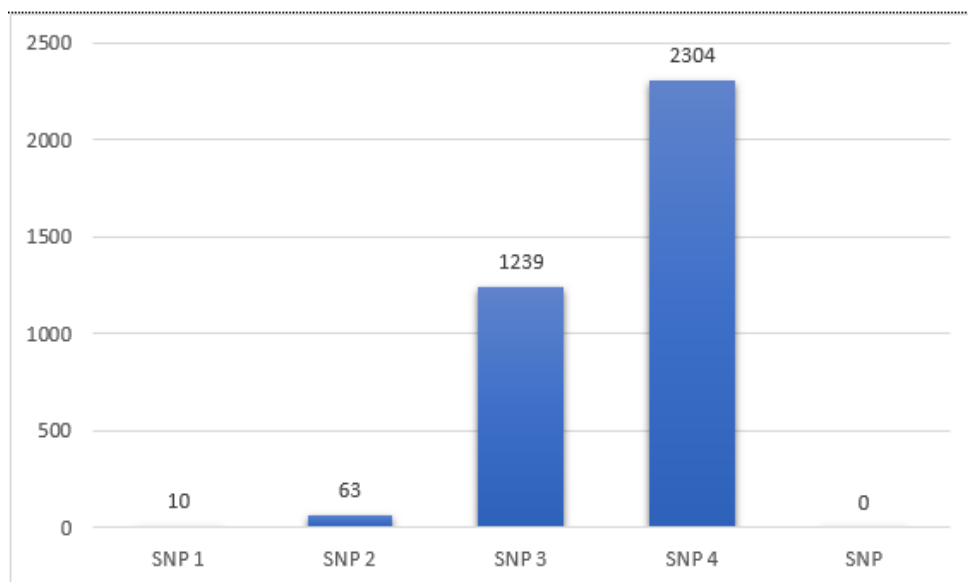
Kabupaten	Capaian	Kategori				
		Menuju SNP 1	Menuju SNP 2	Menuju SNP 3	Menuju SNP 4	SNP
Kota Pekanbaru	5.26				*	
Kota Dumai	5.23				*	
Kab. Kampar	5.1				*	
Kab. Siak	5.22				*	
Kab. Pelalawan	5.3				*	
Kab. Bengkalis	5.21				*	
Kab. Rokan Hulu	5.15				*	
Kab. Rokan Hilir	5.16				*	
Kab. Indragiri Hulu	5.1				*	
Kab. Indragiri Hilir	4.96			*		
Kab. Kep. Meranti	5.1				*	

Kabupaten	Capaian	Kategori				
		Menuju SNP 1	Menuju SNP 2	Menuju SNP 3	Menuju SNP 4	SNP
Kab. Kuantan Singingi	5.13				*	
Provinsi	5.15				*	
Nasional	5.15				*	

Sumber : Pengolahan data PMP LPMP Riau Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan pencapaian SNP terendah untuk jenjang SD dengan pencapaian 4.96 atau kategori MENUJU SNP 3. Sedangkan pencapaian SNP 11 kab/kota lainnya berada pada kategori MENUJU SNP 4 dengan pencapaian tertinggi adalah Kabupaten Pelalawan yaitu 5.30. Capaian ini telah melampaui rerata capaian SNP Provinsi dan nasional.

Untuk informasi jumlah sekolah dapat dilihat pada grafik jumlah sekolah berdasarkan perolehan capaian SNP di bawah ini :

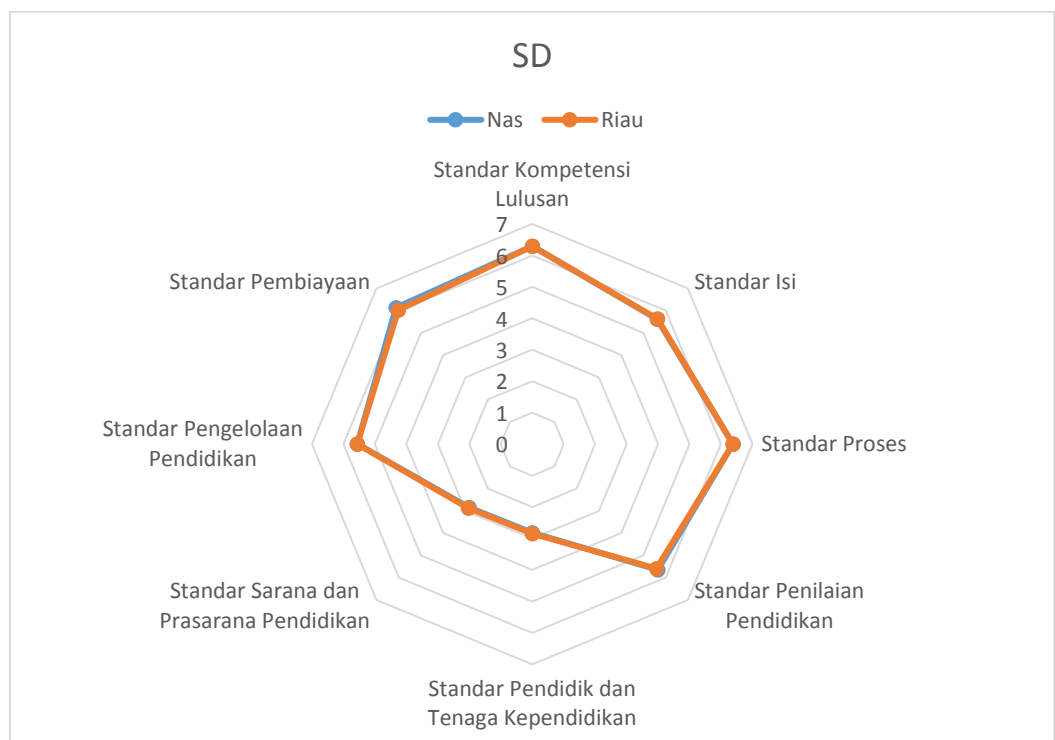


Grafik 3.3. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa di Provinsi Riau capaian SNP tertinggi hanya mencapai kategori MENUJU SNP 4 yaitu sebanyak 2.304 sekolah dan belum ada sekolah yang mencapai kategori SNP.

3. Capaian SNP untuk masing-masing Standar

Gambaran capaian SNP jenjang SD di Provinsi Riau untuk masing – masing standar dapat dilihat pada grafik radar di bawah ini :



Grafik 3.4. Radar Capaian SNP Jenjang SD

Skor capaian mutu jenjang SD di Provinsi Riau untuk masing – masing standar dipaparkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Capaian SNP masing – masing standar

No	Standar Nasional Pendidikan	Rerata Capaian	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.29	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5.63	Menuju SNP 4
3	Standar Proses	6.38	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.59	Menuju SNP 4
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.85	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.87	Menuju SNP 2
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.56	Menuju SNP 4
8	Standar Pembiayaan	6.02	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian SNP masing-masing standar di Provinsi Riau belum mencapai SNP. Capaian mutu tertinggi berada pada Standar Proses dengan capaian 6.38 kategori MENUJU SNP 4. Di samping itu, yang menjadi perhatian adalah Standar PTK dan Sarana Prasarana dengan capaian 2.85 dan 2.87 kategori MENUJU SNP 2.

b. Persentase Sekolah Dasar (SD) yang meningkat indeks efektivitasnya

Untuk menghitung indeks efektivitas satuan pendidikan berdasarkan capaian SNP adalah dengan melihat capaian SNP tahun 2016 yang dijadikan sebagai *baseline* dibandingkan dengan capaian SNP tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Capaian SNP 2016 dan 2017

Jenjang	Capaian SNP 2016 (Base line)					Capaian SNP 2017				
	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP
SD	282	219	2824	291	0	10	63	1239	2304	0

Berdasarkan tabel diatas, capaian SNP terbanyak tahun 2016 berada pada kategori **MENUJU SNP 3**, sedangkan tahun 2017 capaian terbanyak berada pada kategori **MENUJU SNP 4**. Realisasi capaian indeks efektivitas jenjang SD tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6. Indeks Efektivitas Jenjang SD

Jenjang	Indeks Efektivitas dari Tahun 2016 ke 2017			
	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar	1448	40	3258	90

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi jumlah sekolah yang meningkat indeks efektivitasnya adalah sebanyak 90% atau 3258 sekolah. Capaian ini melebihi target 2017 sebesar 40% atau 1448 sekolah. Hal ini menunjukkan keberhasilan LPMP Riau dalam meningkatkan indeks efektivitas satuan pendidikan melalui capaian 8 SNP.

1.2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah dipetakan mutu pendidikannya.

1. Gambaran Umum

Indikator kerja persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah dipetakan mutu Pendidikan di Provinsi Riau hampir mencapai target renstra yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7. Target dan Realisasi SMP yang terpetakan mutu pendidikannya

Jumlah Sekolah	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1143	1143	100	1118	97,81

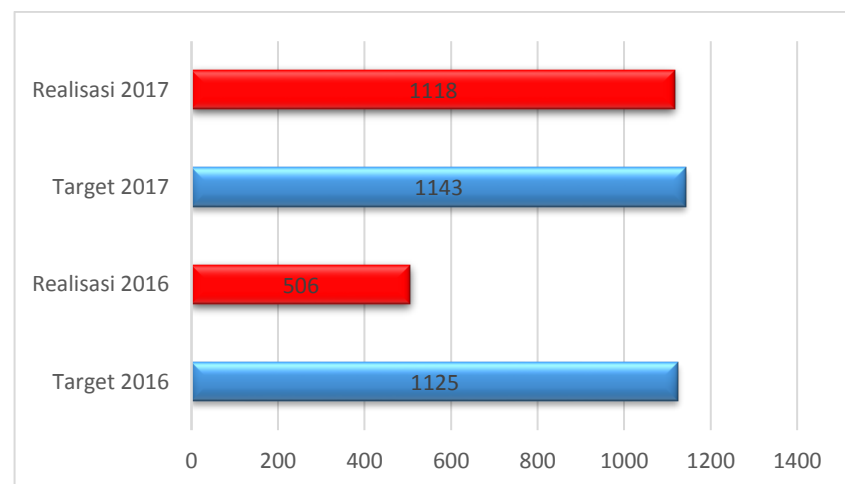
Berdasarkan tabel 3.7. di atas, terlihat bahwa target tahun 2017 sebesar 100% atau 1143 sekolah. Realisasi capaian tahun 2017 adalah sebesar 97.81% atau 1118 sekolah. Hal ini menggambarkan masih terdapat 25 sekolah (2.19%) yang belum terpetakan mutu pendidikannya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Masih terdapat sekolah yang tidak beroperasi, namun masih terdaftar pada aplikasi PMP;
- Terdapat sekolah yang tidak merespon program PMP sehingga tidak melakukan proses pengisian dan pengiriman instrumen. Hal disebabkan oleh kurangnya pemahaman sekolah tentang pentingnya sistem penjaminan mutu Pendidikan (SPMP). Bahkan banyak sekolah yang beranggapan bahwa SPMP hanya sebagai program yang menambah beban tugas sekolah;

- c. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki NPSN sebagai akibat perubahan status dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri;
- d. Terdapat beberapa sekolah yang telah melakukan pengiriman data PMP namun sistem tidak memproses pengolahan peta mutu. Hal ini disebabkan oleh pengisian instrument oleh sekolah tidak lengkap;
- e. Terdapat beberapa sekolah yang tidak bisa melakukan pengiriman data PMP karena jumlah minimal responden tidak terpenuhi;
- f. Respon penerimaan pengiriman data PMP oleh sekolah melalui server pusat masih terkendala, sehingga banyak sekolah yang kesulitan mengirimkan data PMP.

Jika dilihat dari capaian realisasi indikator tahun 2016, capaian tahun 2017 ini sudah menunjukkan peningkatan. Dimana tahun 2016 realisasi SMP yang terpetakan mutu pendidikannya sebesar 45% atau 506 sekolah. Terdapat peningkatan realisasi capaian sebesar 52.81%.

Pencapaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



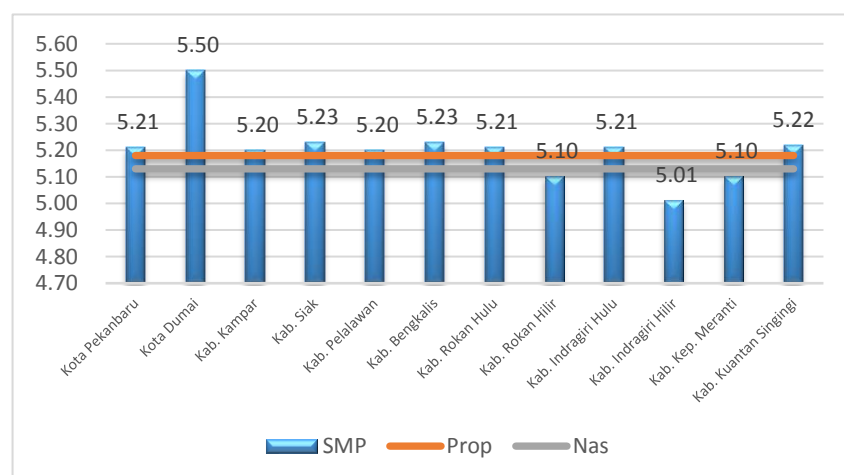
Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017

Keberhasilan ini merupakan wujud dari langkah strategis LPMP Riau Tahun 2017 dalam mengatasi beberapa kendala yang ditemui, diantaranya :

- a. Pembentukan Tim Akselerasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) LPMP Riau;
- b. Pelibatan Pengawas sekolah dan Operator Kecamatan sebagai garda terdepan koodinator petugas pengumpulan data di masing-masing wilayah;
- c. Peningkatan frekuensi dan pola komunikasi koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- d. Pemberian bantuan transportasi local bagi pengawas dalam rangka pengumpulan data PMP ke sekolah binaan;
- e. Pemberian honorarium kepada Operator PMP di tingkat kecamatan sebanyak 163 orang selama 6 (enam) bulan.

2. Capaian Mutu Satuan Pendidikan

Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.6. Peta Capaian SNP Jenjang SMP di Provinsi Riau Tahun 2017

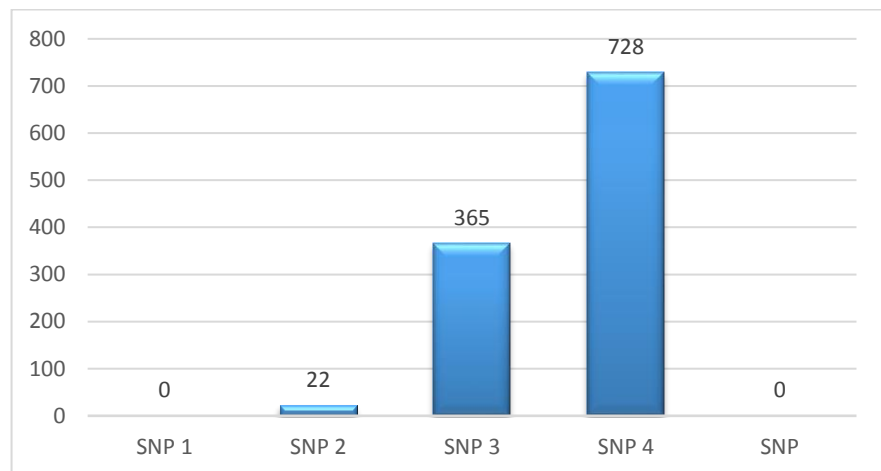
Skor capaian peta mutu jenjang SMP untuk masing – masing kab/kota dipaparkan pada tabel 3.8. di bawah ini :

Tabel 3.8. Capaian Kategori SNP Jenjang SMP

Kabupaten	Capaian	Kategori				
		Menuju SNP 1	Menuju SNP 2	Menuju SNP 3	Menuju SNP 4	SNP
Kota Pekanbaru	5,21				*	
Kota Dumai	5,5				*	
Kab. Kampar	5,2				*	
Kab. Siak	5,23				*	
Kab. Pelalawan	5,2				*	
Kab. Bengkalis	5,23				*	
Kab. Rokan Hulu	5,21				*	
Kab. Rokan Hilir	5,1				*	
Kab. Indragiri Hulu	5,21				*	
Kab. Indragiri Hilir	5,01			*		
Kab. Kep. Meranti	5,1				*	
Kab. Kuantan Singingi	5,22				*	
Provinsi	5,18				*	
Nasional	5,13				*	

Sumber : Pengolahan data PMP LPMP Riau Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan pencapaian SNP terendah untuk jenjang SMP dengan pencapaian 5.01 atau kategori MENUJU SNP 3. Sedangkan pencapaian SNP 11 kab/kota lainnya berada pada kategori MENUJU SNP 4 dengan pencapaian tertinggi adalah Kota Dumai yaitu 5.5. Capaian ini telah melampaui rerata capaian SNP Provinsi dan nasional. Untuk informasi jumlah sekolah dapat dilihat pada grafik jumlah sekolah berdasarkan perolehan capaian SNP di bawah ini :

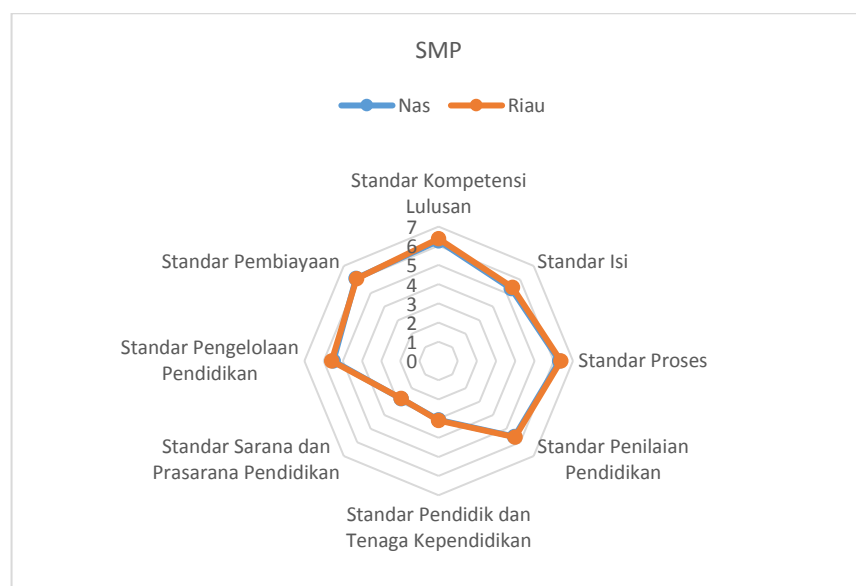


Grafik 3.7. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa di Provinsi Riau capaian SNP tertinggi hanya mencapai kategori MENUJU SNP 4 yaitu sebanyak 728 sekolah dan belum ada sekolah yang mencapai kategori SNP.

3. Capaian SNP untuk masing – masing Standar

Gambaran capaian SNP jenjang SMP di Provinsi Riau untuk masing – masing standar dapat dilihat pada grafik radar di bawah ini :



Grafik 3.8. Radar Capaian SNP Jenjang SMP

Skor capaian mutu jenjang SMP di Provinsi Riau untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9. Capaian SNP masing – masing standar

No	Standar Nasional Pendidikan	Rata Capaian	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,37	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5,43	Menuju SNP 4
3	Standar Proses	6,37	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,62	Menuju SNP 4
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,11	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2,77	Menuju SNP 2
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,58	Menuju SNP 4
8	Standar Pembiayaan	6,06	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian SNP masing – masing standar di Provinsi Riau belum mencapai SNP. Capaian mutu tertinggi berada pada Standar Proses dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan capaian 6.37 kategori MENUJU SNP 4. Di samping itu, yang menjadi perhatian adalah Standar PTK dan Sarana Prasarana dengan capaian 3.11 dan 2.77 kategori MENUJU SNP 2.

b. Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meningkat indeks efektivitasnya

Untuk menghitung indeks efektivitas satuan pendidikan berdasarkan capaian SNP adalah dengan melihat capaian SNP tahun 2016 yang dijadikan sebagai *baseline* dibandingkan dengan capaian SNP tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Capaian SNP 2016 dan 2017

Jenjang	Capaian SNP 2016 (Base line)					Capaian SNP 2017				
	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP
SMP	176	94	737	108	0	0	22	365	728	0

Berdasarkan tabel di atas, capaian SNP terbanyak tahun 2016 berada pada kategori **MENUJU SNP 3** yaitu 737 sekolah, sedangkan tahun 2017 capaian terbanyak berada pada kategori **MENUJU SNP 4** yaitu 728 sekolah. Realisasi capaian indeks efektivitas jenjang SMP tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Indeks Efektivitas Jenjang SMP

Jenjang	Indeks Efektivitas dari Tahun 2016 ke 2017			
	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Menengah Pertama	671	60	982	87,8

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi jumlah sekolah yang meningkat indeks efektivitasnya adalah sebanyak 87,8% atau 982 sekolah. Capaian ini melebihi target 2017 sebesar 60% atau 671 sekolah. Hal ini menunjukkan keberhasilan LPMP Riau dalam meningkatkan indeks efektivitas satuan pendidikan melalui capaian 8 SNP.

1.3. Sekolah Menengah Atas (SMA)

a. Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah dipetakan mutu pendidikannya

1. Gambaran Umum

Indikator kerja persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah dipetakan mutu Pendidikan di Provinsi Riau hampir mencapai target renstra yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12. Target dan Realisasi SMA yang terpetakan mutu pendidikannya

Jumlah Sekolah	Target	Realisasi		
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Menengah Atas	441	100	421	95,46

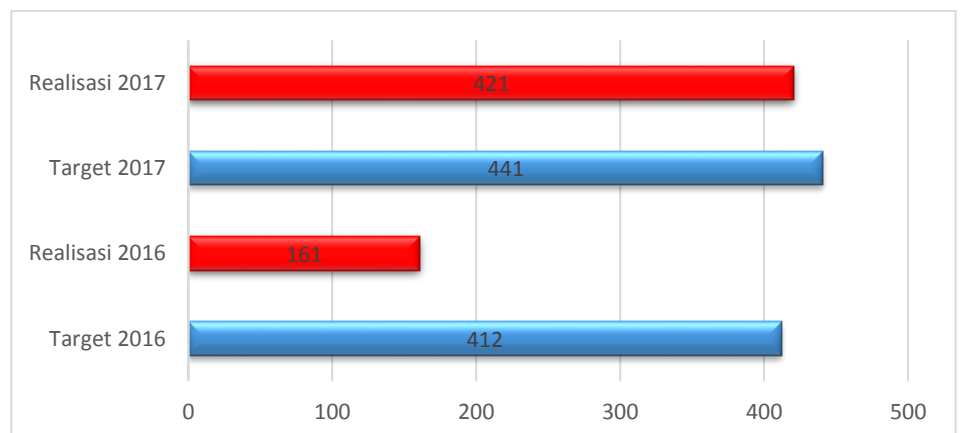
Berdasarkan tabel 3.12. di atas, terlihat bahwa target tahun 2017 sebesar 100% atau 441 sekolah. Realisasi capaian tahun 2017 adalah sebesar 95.46% atau 421 sekolah. Hal ini menggambarkan masih terdapat 20 sekolah (4.54%) yang belum terpetakan mutu pendidikannya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Masih terdapat sekolah yang tidak beroperasi, namun masih terdaftar pada aplikasi PMP;
- Terdapat sekolah yang tidak merespon program PMP sehingga tidak melakukan proses pengisian dan pengiriman instrumen. Hal disebabkan oleh kurangnya pemahaman sekolah tentang pentingnya sistem penjaminan mutu Pendidikan (SPMP). Bahkan banyak sekolah yang beranggapan bahwa SPMP hanya sebagai program yang menambah beban tugas sekolah;

- c. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki NPSN sebagai akibat perubahan status dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri;
- d. Terdapat beberapa sekolah yang telah melakukan pengiriman data PMP namun sistem tidak memproses pengolahan peta mutu. Hal ini disebabkan oleh pengisian instrument oleh sekolah tidak lengkap;
- e. Terdapat beberapa sekolah yang tidak bisa melakukan pengiriman data PMP karena jumlah minimal responden tidak terpenuhi;
- f. Respon penerimaan pengiriman data PMP oleh sekolah melalui server pusat masih terkendala, sehingga banyak sekolah yang kesulitan mengirimkan data PMP.

Jika dilihat dari capaian realisasi indikator tahun 2016, capaian tahun 2017 ini sudah menunjukkan peningkatan. Dimana tahun 2016 realisasi SMA yang terpetakan mutu pendidikannya sebesar 39,1% atau 161 sekolah. Terdapat peningkatan realisasi capaian sebesar 56.36%.

Pencapaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



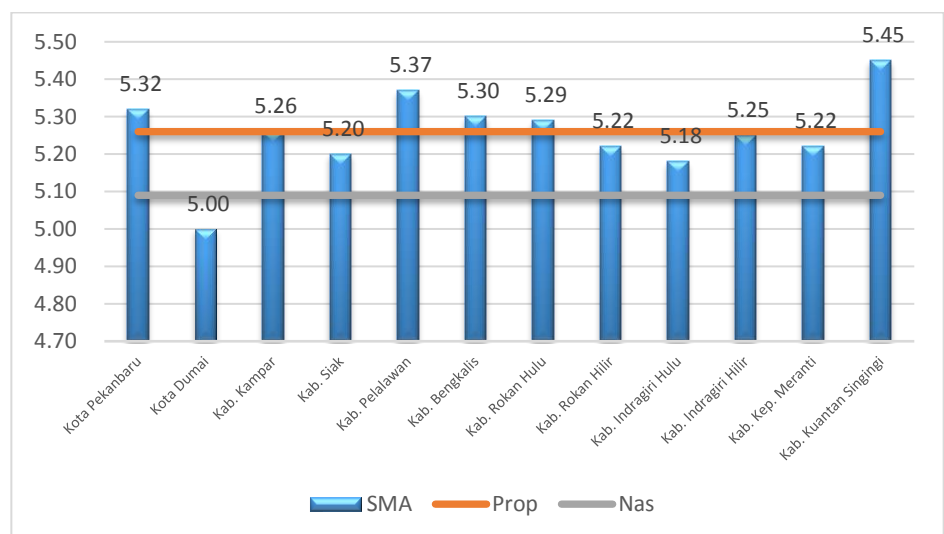
Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017

Keberhasilan ini merupakan wujud dari langkah strategis LPMP Riau Tahun 2017 dalam mengatasi beberapa kendala yang ditemui, diantaranya :

- a. Pembentukan Tim Akselerasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) LPMP Riau;
- b. Pelibatan Pengawas sekolah dan Operator Kecamatan sebagai garda terdepan koodinator petugas pengumpulan data di masing – masing wilayah;
- c. Peningkatan frekuensi dan pola komunikasi koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- d. Pemberian bantuan transportasi lokal bagi pengawas dalam rangka pengumpulan data PMP ke sekolah binaan;
- e. Pemberian honorarium kepada Operator PMP di tingkat kecamatan sebanyak 163 orang selama 6 (enam) bulan.

2. Capaian Mutu Satuan Pendidikan

Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.10. Peta Capaian SNP Jenjang SMA Riau Tahun 2017

Skor capaian peta mutu jenjang SMA untuk masing – masing kab/kota dipaparkan pada tabel 3.13. di bawah ini :

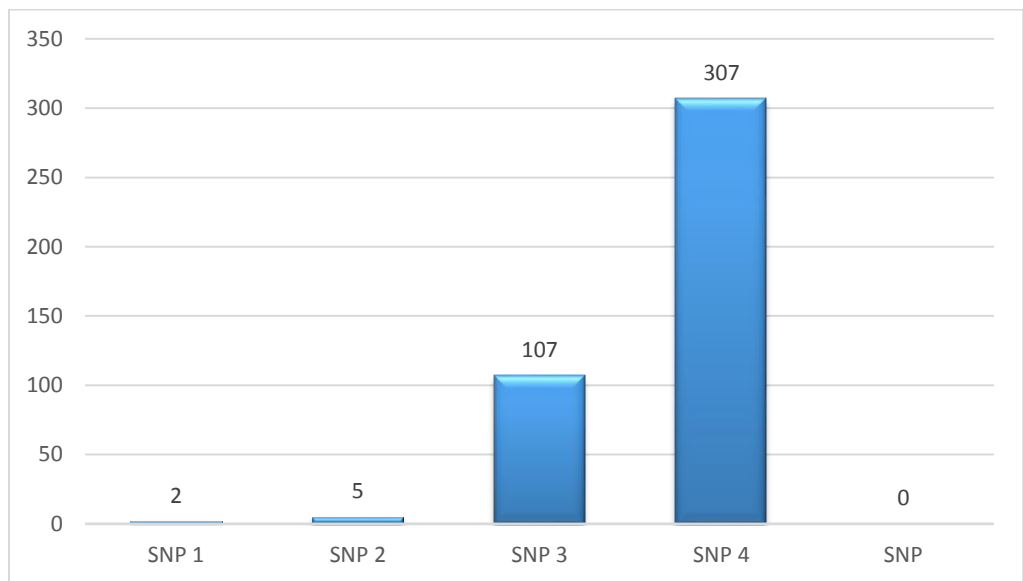
Tabel 3.13. Capaian Kategori SNP Jenjang SMA

Kabupaten	Capaian	Kategori				
		Menuju SNP 1	Menuju SNP 2	Menuju SNP 3	Menuju SNP 4	SNP
Kota Pekanbaru	5,32				*	
Kota Dumai	5			*		
Kab. Kampar	5,26				*	
Kab. Siak	5,2				*	
Kab. Pelalawan	5,37				*	
Kab. Bengkalis	5,3				*	
Kab. Rokan Hulu	5,29				*	
Kab. Rokan Hilir	5,22				*	
Kab. Indragiri Hulu	5,18				*	
Kab. Indragiri Hilir	5,25				*	
Kab. Kep. Meranti	5,22				*	
Kab. Kuantan Singingi	5,45				*	
Provinsi	5,26				*	
Nasional	5,09				*	

Sumber : Pengolahan data PMP LPMP Riau Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kota Dumai merupakan kabupaten/kota dengan pencapaian SNP terendah untuk jenjang SMA dengan pencapaian 5.00 atau kategori MENUJU SNP 3. Sedangkan pencapaian SNP 11 kab/kota lainnya berada pada kategori MENUJU SNP 4 dengan pencapaian tertinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 5.45. Capaian ini telah melampaui rerata capaian SNP Provinsi dan nasional.

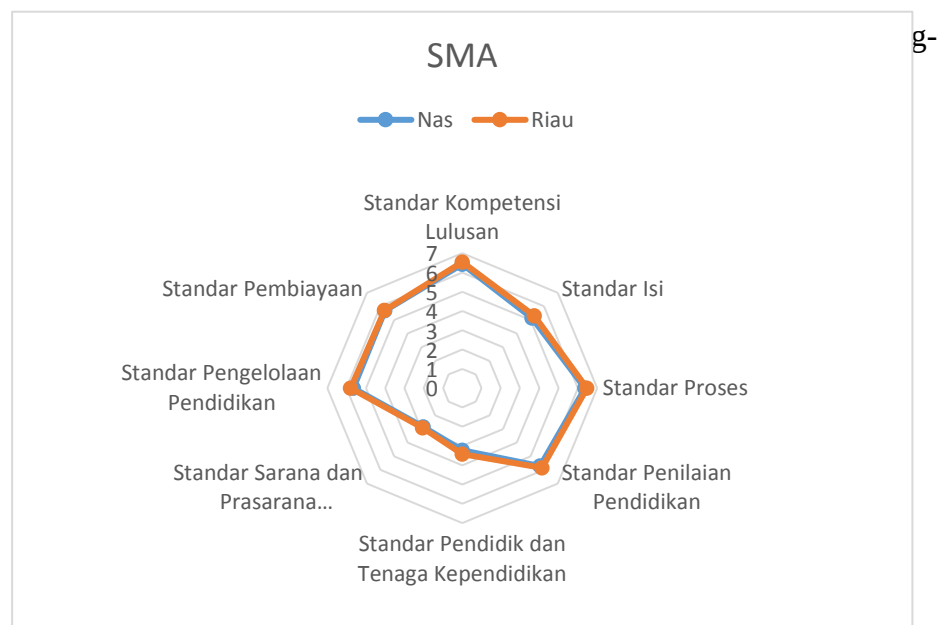
Untuk informasi jumlah sekolah dapat dilihat pada grafik jumlah sekolah berdasarkan perolehan capaian SNP di bawah ini :



Grafik 3.11. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa di Provinsi Riau capaian SNP tertinggi hanya mencapai kategori MENUJU SNP 4 yaitu sebanyak 307 sekolah dan belum ada sekolah yang mencapai kategori SNP.

3. Capaian SNP untuk masing – masing Standar



Grafik 3.12. Radar SNP Jenjang SMA

Skor capaian mutu jenjang SMA di Provinsi Riau untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14. Capaian SNP masing – masing standar

No	Standar Nasional Pendidikan	Rata Capaian	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,54	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5,3	Menuju SNP 4
3	Standar Proses	6,47	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,85	Menuju SNP 4
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,42	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2,91	Menuju SNP 2
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,79	Menuju SNP 4
8	Standar Pembiayaan	5,7	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian SNP masing – masing standar di Provinsi Riau belum mencapai SNP. Capaian mutu tertinggi berada pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan capaian 6.54 kategori MENUJU SNP 4. Di samping itu, yang menjadi perhatian adalah Standar PTK dan Sarana Prasarana dengan capaian 3.42 dan 2.91 kategori MENUJU SNP 2.

b. Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) yang meningkat indeks efektivitasnya.

Untuk menghitung indeks efektivitas satuan pendidikan berdasarkan capaian SNP adalah dengan melihat capaian SNP tahun 2016 yang dijadikan sebagai *baseline* dibandingkan dengan capaian SNP tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15. Capaian SNP 2016 dan 2017

Jenjang	Capaian SNP 2016 (Base line)					Capaian SNP 2017				
	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP
SMA	72	46	223	80	0	2	5	107	307	0

Berdasarkan tabel di atas, capaian SNP terbanyak tahun 2016 berada pada kategori **MENUJU SNP 3** yaitu 223 sekolah, sedangkan tahun 2017 capaian terbanyak berada pada kategori **MENUJU SNP 4** yaitu 307 sekolah. Realisasi capaian indeks efektivitas jenjang SMP tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16. Indeks Efektivitas Jenjang SMA

Jenjang	Indeks Efektivitas dari Tahun 2016 ke 2017			
	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Menengah Atas	253	60	351	83,4

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi jumlah sekolah yang meningkat indeks efektivitasnya adalah sebanyak 83.4% atau 351 sekolah. Capaian ini melebihi target 2017 sebesar 60% atau 253 sekolah. Hal ini menunjukkan keberhasilan LPMP Riau dalam meningkatkan indeks efektivitas satuan pendidikan melalui capaian 8 SNP.

1.4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a. Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah dipetakan mutu pendidikannya

1. Gambaran Umum

Indikator kerja persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah dipetakan mutu Pendidikan di Provinsi Riau hampir mencapai target renstra yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

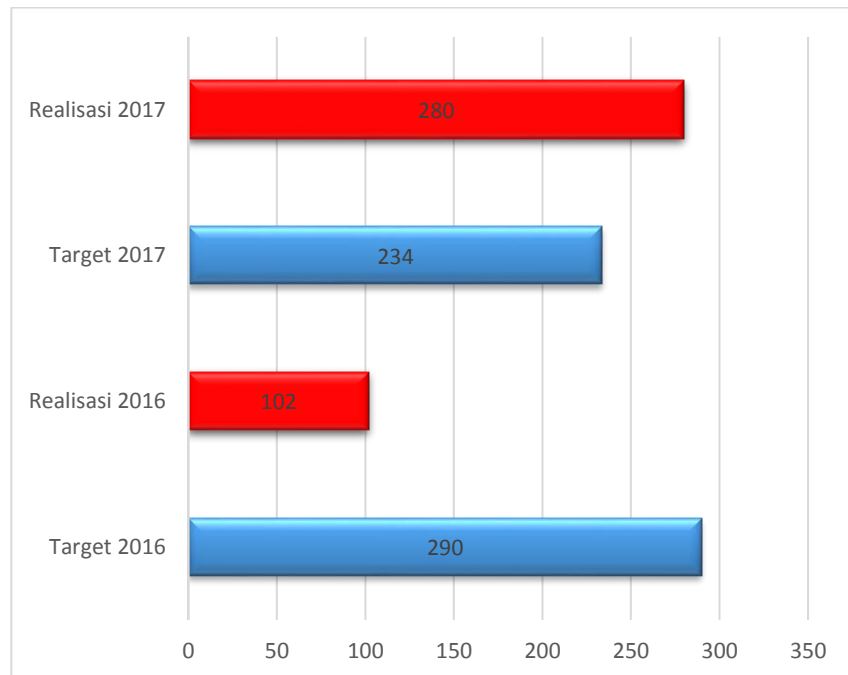
Tabel 3.17. Target dan Realisasi SMK yang terpetakan mutu pendidikannya

Jumlah Sekolah	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Menengah Kejuruan	234	80	280	95,56

Berdasarkan tabel 3.17. di atas, terlihat bahwa target tahun 2017 sebesar 80% atau 234 sekolah. Realisasi capaian tahun 2017 adalah sebesar 95.56% atau 280 sekolah. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan khususnya untuk jenjang SMK.

Jika dilihat dari capaian realisasi indikator tahun 2016, capaian tahun 2017 ini juga menunjukkan peningkatan. Dimana tahun 2016 realisasi SMK yang terpetakan mutu pendidikannya sebesar 35,2% atau 102 sekolah. Terdapat peningkatan realisasi capaian sebesar 60.36%.

Pencapaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



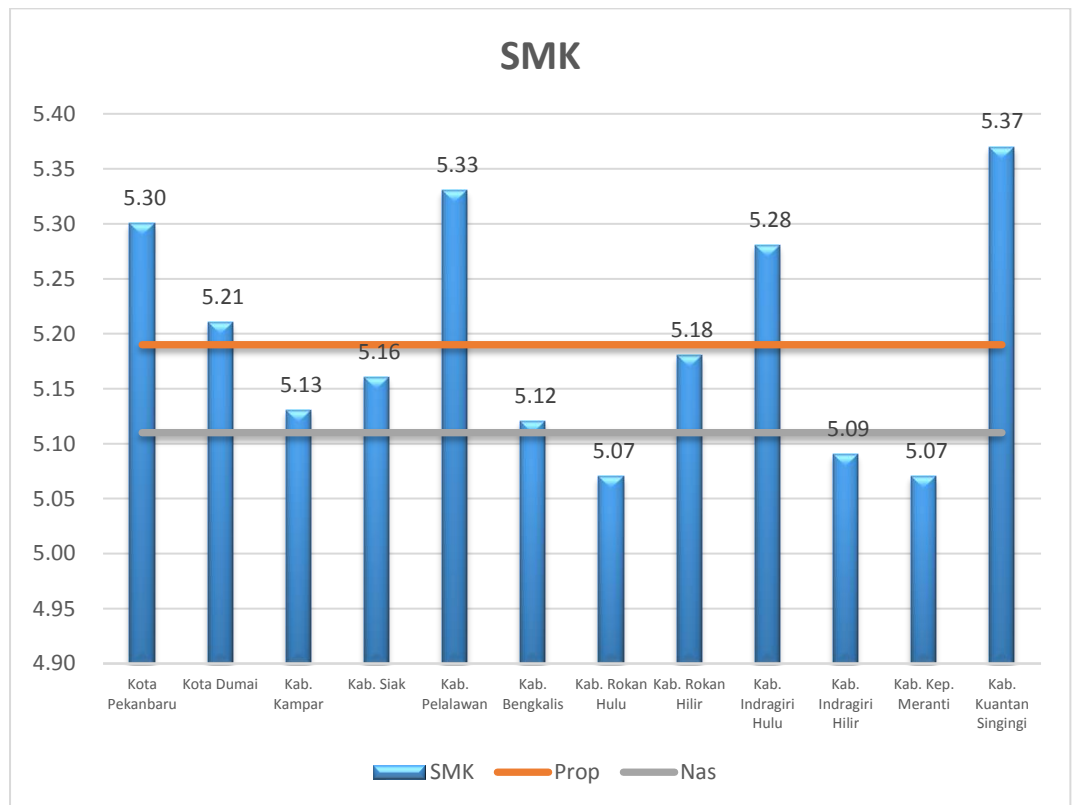
Grafik 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja 2016 dan 2017

Keberhasilan ini merupakan wujud dari langkah strategis LPMP Riau Tahun 2017 dalam mengatasi beberapa kendala yang ditemui, diantaranya :

- a. Pembentukan Tim Akselerasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) LPMP Riau;
- b. Pelibatan Pengawas sekolah dan Operator Kecamatan sebagai garda terdepan koordinator petugas pengumpulan data di masing – masing wilayah;
- c. Peningkatan frekuensi dan pola komunikasi koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- d. Pemberian bantuan transportasi lokal bagi pengawas dalam rangka pengumpulan data PMP ke sekolah binaan;
- e. Pemberian honorarium kepada Operator PMP di tingkat kecamatan sebanyak 163 orang selama 6 (enam) bulan.

2. Capaian Mutu Satuan Pendidikan

Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.14. Peta Capaian SNP Jenjang SMK Riau Tahun 2017

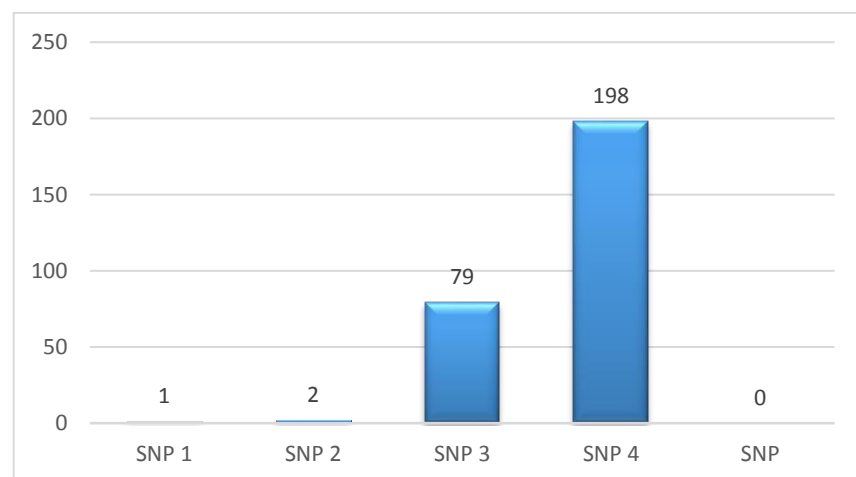
Skor capaian peta mutu jenjang SMK untuk masing – masing kab/kota dipaparkan pada tabel 3.18. di bawah ini :

Tabel 3.18. Capaian Kategori SNP Jenjang SMK

Kabupaten	Capaian	Kategori				SNP
		Menuju SNP 1	Menuju SNP 2	Menuju SNP 3	Menuju SNP 4	
Kota Pekanbaru	5,3				*	
Kota Dumai	5,21				*	
Kab. Kampar	5,13				*	
Kab. Siak	5,16				*	
Kab. Pelalawan	5,33				*	

Kab. Bengkalis	5,12				*	
Kab. Rokan Hulu	5,07				*	
Kab. Rokan Hilir	5,18				*	
Kab. Indragiri Hulu	5,28				*	
Kab. Indragiri Hilir	5,09				*	
Kab. Kep. Meranti	5,07				*	
Kab. Kuantan Singingi	5,37				*	
Provinsi	5,19				*	
Nasional	5,11				*	

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa semua SMK yang ada di Provinsi Riau berada pada kategori MENUJU SNP 4. Kabupaten dengan capaian SNP tertinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi dengan capaian 5.37. Sedangkan kabupaten dengan capaian SNP terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kep. Meranti dengan capaian 5.07. Untuk informasi jumlah sekolah dapat dilihat pada grafik jumlah sekolah berdasarkan perolehan capaian SNP di bawah ini :

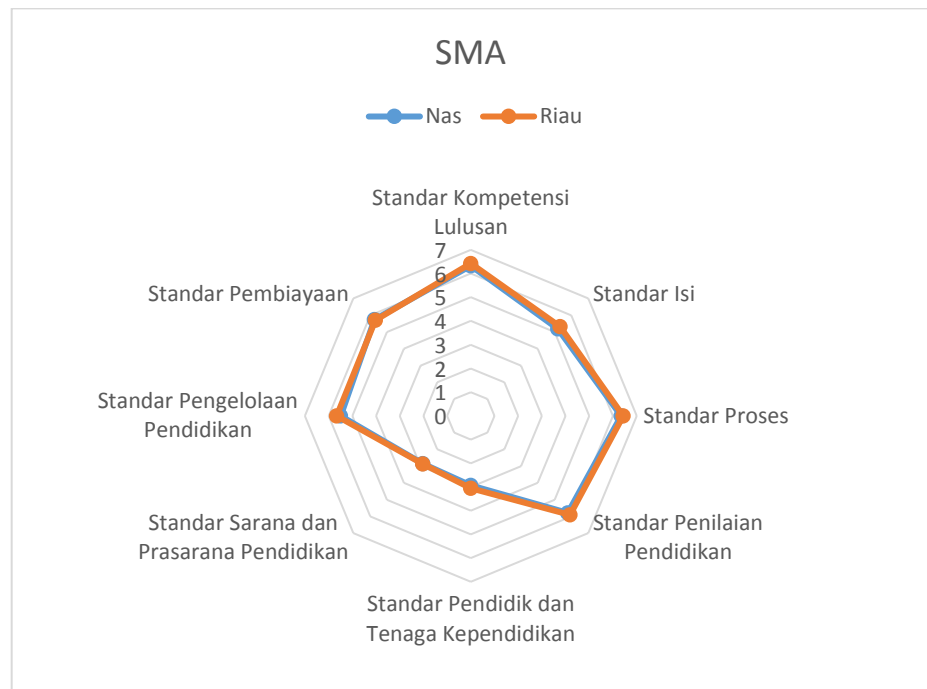


Grafik 3.15. Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian SNP

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa di Provinsi Riau capaian SNP tertinggi hanya mencapai kategori MENUJU SNP 4 yaitu sebanyak 198 sekolah dan belum ada sekolah yang mencapai kategori SNP.

3. Capaian SNP untuk masing-masing Standar

Gambaran capaian SNP jenjang SMA di Provinsi Riau untuk masing-masing standar dapat dilihat pada grafik radar di bawah ini :



Grafik 3.16. Radar Capaian SNP Jenjang SMA

Skor capaian mutu jenjang SMA di Provinsi Riau untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19. Capaian SNP masing – masing standar

No	Standar Nasional Pendidikan	Rata Capaian	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,43	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5,33	Menuju SNP 4
3	Standar Proses	6,43	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,91	Menuju SNP 4
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,06	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2,87	Menuju SNP 2
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,66	Menuju SNP 4
8	Standar Pembiayaan	5,7	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian SNP masing-masing standar di Provinsi Riau belum mencapai SNP. Capaian mutu tertinggi berada pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Proses dengan capaian 6.43 kategori MENUJU SNP 4. Di samping itu, yang menjadi perhatian adalah Standar PTK dan Sarana Prasarana dengan capaian 3.06 dan 2.87 kategori MENUJU SNP 2.

b. Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang meningkat indeks efektivitasnya.

Untuk menghitung indeks efektivitas satuan pendidikan berdasarkan capaian SNP adalah dengan melihat capaian SNP tahun 2016 yang dijadikan sebagai *baseline* dibandingkan dengan capaian SNP tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20. Capaian SNP 2016 dan 2017

Jenjang	Capaian SNP 2016 (Base line)					Capaian SNP 2017				
	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP
SMK	68	25	167	20	0	1	2	79	198	0

Berdasarkan tabel di atas, capaian SNP terbanyak tahun 2016 berada pada kategori **MENUJU SNP 3** yaitu 167 sekolah, sedangkan tahun 2017 capaian terbanyak berada pada kategori **MENUJU SNP 4** yaitu 198 sekolah. Realisasi capaian indeks efektivitas jenjang SMP tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.21. Indeks Efektivitas Jenjang SMK

Jenjang	Indeks Efektivitas dari Tahun 2016 ke 2017			
	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Menengah Kejuruan	126	45	249	88,9

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi jumlah sekolah yang meningkat indeks efektivitasnya adalah sebanyak 88.9% atau 249 sekolah. Capaian ini melebihi target 2017 sebesar 45% atau 126 sekolah. Hal ini menunjukkan keberhasilan LPMP Riau dalam meningkatkan indeks efektivitas satuan pendidikan melalui capaian 8 SNP.

4. Persentase Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

a. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Tabel 3.22 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%	37%	93%
<i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SD)</i>	76	75	99%
<i>Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)</i>	1280	1280	100%
	1356	1355	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dan organisasi untuk persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 93 persen yang berasal Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP. Mengacu pada data jumlah SD bulan desember 2017 yang ada di Riau sebanyak 3655 dimana pada bulan desember 2016 sebanyak 3631, maka total SD yang telah di supervise dan difasilitasi mestinya mencapai 1462 sekolah, namun yang dialokasikan melalui

pembiayaan di LPMP Riau hanya sebesar 1356. Hal ini menjelaskan mengapa capaian LPMP Riau hanya sebesar 93 persen.

Tabel 3.23 Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SD)

No.	Kab/ Kota	Satuan pendidikan SD					
		Capaian					
		2016			2017		
		Target	Real	%	Target	Real	%
1	Pekanbaru	8	4	50%	10	6	60%
2	Bengkalis	8	4	50%	10	6	60%
3	Dumai	8	4	50%	10	7	70%
4	Inhil	8	4	50%	10	6	60%
5	Inhu	8	4	50%	10	6	60%
6	Kampar	8	4	50%	10	6	60%
7	Siak	8	4	50%	10	6	60%
8	Kuansing	8	4	50%	10	7	70%
9	Pelalawan	8	4	50%	10	5	50%
10	Rohul	8	4	50%	10	6	60%
11	Rohil	8	4	50%	10	6	60%
12	Kep. Meranti	8	4	50%	10	8	80%
	JUMLAH	96	48	50%	120	75	63%

Tabel 3.24 Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)

Kab/ Kota	Jumlah Sekolah	Satuan pendidikan SD										
		Capaian										
		2015			2016			2017			2015 + 2016+2017	
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Real	%
Kab. Kuantan Singingi	247	15	3	1.2	47	54	22	80	80	100	137	41.07
Kab. Bengkalis	339	20	1	0.3	64	78	23	120	120	100	199	41.10
Kab. Indragiri Hulu	297	18	0	0	56	72	24	120	120	100	192	41.33
Kab. Siak	225	14	5	2.2	43	52	23	81	81	100	138	41.74
Kab. Kampar	485	29	3	0.6	92	108	22	162	162	100	273	40.87
Kab. Pelalawan	221	13	8	3.6	42	51	23	81	81	100	140	42.21
Kab. Rokan Hulu	363	22	0	0	69	79	22	160	160	100	239	40.67
Kab. Indragiri Hilir	520	31	0	0	99	117	23	160	160	100	277	41.00
Kab. Rokan Hilir	362	22	0	0	69	75	21	120	120	100	195	40.33

Kab/ Kota	Jumlah Sekolah	Satuan pendidikan SD										
		Capaian										
		2015			2016			2017			2015 + 2016+2017	
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Real	%
Kota Dumai	102	6	5	4.9	19	61	60	34	34	100	100	54.97
Kota Pekanbaru	296	18	12	4.1	56	58	20	122	122	100	192	41.35
Kab. Kepulauan Meranti	174	10	0	0	33	45	26	40	40	100	85	42.00
JUMLAH	3631	218	37	1	689	850	23	1280	1280	100	2167	41.34

Tabel 3.25 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2016 dan tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	25%	99%	40%	37%	93%
<i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SD)</i>	48	48	100%	76	75	99%
<i>Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)</i>	907	850	94%	1280	1280	100%
	907	898		1356	1355	

Menurut data tabel diatas, output Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SD) melalui program sekolah model direncanakan sebanyak 76 sekolah, namun dalam pelaksanaanya hanya terealisasi untuk 75 sekolah. Hal ini disebabkan lokasi sekolah tersebut sulit diakses. Sementara untuk output Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD), ditargetkan sebanyak 1280 sekolah dan berhasil direalisasikan sebesar 1280 atau 100 persen.

Meskipun pencapaian target untuk satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD) bisa mencapai target yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa persoalan yang

teridentifikasi dalam pelaksanaan output ini antara lain adanya perubahan data peserta dari dinas Pendidikan, mutasi kepala sekolah yang mendadak. Secara umum persoalan diatas tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan.

b. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Tabel 3.26 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%	39%	98%
Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMP)	48	48	100%
Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)	396	396	100%
	444	444	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dan organisasi untuk persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 98 persen yang berasal output Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP. Hal ini karena tidak tercapainya jumlah sekolah yang terlayani melalui output Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP dan satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013.

Tabel 3.27. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMP)

No.	Kab/ Kota	Satuan pendidikan SMP					
		Capaian					
		2016			2017		
		Target	Real	%	Target	Real	%
1	Pekanbaru	4	2	50%	6	4	67%
2	Bengkalis	4	2	50%	6	4	67%
3	Dumai	4	2	50%	6	4	67%
4	Inhil	4	2	50%	6	4	67%
5	Inhu	4	2	50%	6	4	67%
6	Kampar	4	2	50%	6	4	67%
7	Siak	4	2	50%	6	4	67%

8	Kuansing	4	2	50%	6	4	67%
9	Pelalawan	4	2	50%	6	4	67%
10	Rohul	4	2	50%	6	4	67%
11	Rohil	4	2	50%	6	4	67%
12	Kep. Meranti	4	2	50%	6	4	67%
JUMLAH		48	24	50%	72	48	67%

Tabel 3.28. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)

Kab/ Kota	Jumlah Sekolah	Satuan pendidikan SMP										
		Capaian										
		2015			2016			2017			2015 + 2016+2017	
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Real	%
Kab. Kuantan Singingi	74	4	6	8.11	14	13	17.6	25	25	100	44	41.89
Kab. Bengkalis	98	6	1	1.02	19	19	19.4	33	33	100	53	40.14
Kab. Indragiri Hulu	64	4	0	0	12	13	20.3	22	22	100	35	40.10
Kab. Siak	101	6	6	5.94	19	18	17.8	33	33	100	57	41.25
Kab. Kampar	127	8	6	4.72	24	22	17.3	42	42	100	70	40.68
Kab. Pelalawan	66	4	5	7.58	13	12	18.2	22	22	100	39	41.92
Kab. Rokan Hulu	129	8	0	0	25	25	19.4	55	55	100	80	39.79
Kab. Indragiri Hilir	137	8	0	0	26	28	20.4	46	46	100	74	40.15
Kab. Rokan Hilir	122	7	0	0	23	22	18	41	41	100	63	39.34
Kota Dumai	34	2	5	14.7	6	6	17.7	22	22	100	33	44.12
Kota Pekanbaru	126	8	34	27	24	16	12.7	40	40	100	90	46.56
Kab. Kepulauan Meranti	47	3	0	0	9	9	19.2	15	15	100	24	39.72
JUMLAH	1125	68	63	5.6	214	203	18	396	396	100	662	41.21

Tabel 3.29 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2016 dan tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
	Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% capaian
Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	20%	81%	40%	39%	98%
<i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMP)</i>	24	24	100%	48	48	100%
<i>Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)</i>	907	203	22%	396	396	100%
	931	227		444	444	

LPMP Riau menargetkan bisa melayani 457 sekolah, sementara yang dialokasikan melalui DIPA LPMP Riau hanya untuk 444 sekolah. Adanya perbedaan jumlah target dengan yang dialokasikan di LPMP Riau karena pergerakan data di Dapodik pada saat penyusunan anggaran dengan data real setelah sinkronisasi data dapodik. Mengacu pada pembiayaan yang tertuang melalui DIPA LPMP Riau, kegiatan untuk 2 output diatas berjalan sesuai rencana.

c. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Tabel 3.30 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%	41%	103%
<i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMA)</i>	34	34	100%
<i>Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)</i>	148	148	100%
	182	182	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dan organisasi untuk persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dapat melampaui target kinerja yang ditetapkan yakni 103 persen.

Tabel 3.31. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMP)

No.	Kab/ Kota	Satuan pendidikan SMP					
		2016			2017		
		Target	Real	%	Target	Real	%
1	Pekanbaru	2	1	50%	4	3	75%
2	Bengkalis	2	1	50%	4	3	75%
3	Dumai	2	1	50%	4	3	75%
4	Inhil	2	1	50%	4	3	75%
5	Inhu	2	1	50%	4	3	75%
6	Kampar	2	1	50%	4	3	75%
7	Siak	2	1	50%	4	3	75%
8	Kuansing	2	1	50%	4	3	75%
9	Pelalawan	2	1	50%	4	2	50%
10	Rohul	2	1	50%	4	3	75%
11	Rohil	2	1	50%	4	3	75%
12	Kep. Meranti	2	1	50%	4	2	50%
	JUMLAH	24	12	50%	48	34	71%

Tabel 3.32. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)

Kab/ Kota	Jumlah Sekolah	Satuan pendidikan SMA										
		Capaian										
		2015			2016			2017			2015 + 2016+2017	
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Real	%
Kab. Kuantan Singingi	21	1	5	23.8	4	5	23.8	7	7	100	17	49.21
Kab. Bengkalis	45	3	2	4.44	9	7	15.6	13	13	100	22	40.00
Kab. Indragiri Hulu	24	1	0	0	5	7	29.2	8	8	100	15	43.06
Kab. Siak	31	2	4	12.9	6	5	16.1	10	10	100	19	43.01
Kab. Kampar	50	3	7	14	10	5	10	26	26	100	38	41.33
Kab. Pelalawan	23	1	4	17.4	4	5	21.7	7	7	100	16	46.38
Kab. Rokan Hulu	34	2	0	0	6	5	14.7	10	10	100	15	38.24

Kab/ Kota	Jumlah Sekolah	Satuan pendidikan SMA										
		Capaian										
		2015			2016			2017			2015 + 2016+2017	
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Real	%
Kab. Indragiri Hilir	42	3	0	0	8	5	11.9	20	20	100	25	37.30
Kab. Rokan Hilir	65	4	0	0	12	5	7.69	22	22	100	27	35.90
Kota Dumai	14	1	6	42.9	3	6	42.9			100	12	61.91
Kota Pekanbaru	60	4	24	40	11	9	15	17	17	100	50	51.67
Kab. Kepulauan Meranti	23	1	0	0	4	6	26.1	8	8	100	14	42.03
JUMLAH	432	26	52	12	82	70	16.2	148	148	100	270	42.75

Tabel 3.32 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2016 dan tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	19%	76%	40%	41.27%	103%
<i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMA)</i>	12	12	100%	34	34	100%
<i>Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)</i>	907	70	8%	148	148	100%
	12	82		182	182	

Dari data diatas, dengan capaian 103 persen menunjukkan terlampauinya capaian kinerja untuk mendukung capaian target nasional yang dilakukan dengan penambahan jumlah sekolah yang tidak terlayani tahun sebelumnya sebesar 76 persen.

d. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Tabel 3.33 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%	54%	135%
<i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMK)</i>	34	34	100%
<i>Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)</i>	124	124	100%
	158	158	

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja dan organisasi untuk persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dapat melampaui target kinerja yang ditetapkan yakni 135 persen.

Tabel 3.34 Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMK)

No.	Kab/ Kota	Satuan pendidikan SMK					
		Capaian					
		2016			2017		
		Target	Real	%	Target	Real	%
1	Pekanbaru	2	1	50%	4	3	75%
2	Bengkalis	2	1	50%	4	3	75%
3	Dumai	2	1	50%	4	2	50%
4	Inhil	2	1	50%	4	3	75%
5	Inhu	2	1	50%	4	3	75%
6	Kampar	2	1	50%	4	3	75%
7	Siak	2	1	50%	4	3	75%
8	Kuansing	2	1	50%	4	2	50%
9	Pelalawan	2	1	50%	4	4	100%
10	Rohul	2	1	50%	4	3	75%
11	Rohil	2	1	50%	4	3	75%
12	Kep. Meranti	2	1	50%	4	2	50%
	JUMLAH	24	12	50%	48	34	71%

Tabel 3.35. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)

Kab/ Kota	Jumlah Sekolah	Satuan pendidikan SMK										
		Capaian										
		2015			2016			2017			2015 + 2016+2017	
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Real	%
Kab. Kuantan Singingi	12	1	4	33.3	2	0	0	7	8	114.29	12	49.21
Kab. Bengkalis	27	2	0	0	5	3	11.1	10	18	180.00	21	63.70
Kab. Indragiri Hulu	16	1	0	0	3	2	12.5	5	5	100.00	7	37.50
Kab. Siak	24	1	3	12.5	5	2	8.33	7	7	100.00	12	40.28
Kab. Kampar	28	2	1	3.57	5	4	14.3	7	10	142.86	15	53.57
Kab. Pelalawan	17	1	0	0	3	1	5.88	5	8	160.00	9	55.29
Kab. Rokan Hulu	37	2	0	0	7	1	2.7	10	18	180.00	19	60.90
Kab. Indragiri Hilir	19	1	0	0	4	2	10.5	7	7	100.00	9	36.84
Kab. Rokan Hilir	28	2	0	0	5	1	3.57	9	9	100.00	10	34.52
Kota Dumai	16	1	2	12.5	3	7	43.8	6	6	100.00	15	52.08
Kota Pekanbaru	59	4	8	13.6	11	8	13.6	22	22	100.00	38	42.37
Kab. Kepulauan Meranti	7	0	0	0	1	1	14.3	3	6	200.00	7	71.43
JUMLAH	290	18	18	6	54	32	11	98	124	131.43	174	49.49

Tabel 3.36 Capaian Perjanjian Kinerja LPMP Riau Jenjang SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2016 dan tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	25%	15%	61%	40%	54%	135%

INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
<i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMK)</i>	12	12	100%	34	34	100%
<i>Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)</i>	907	32	4%	124	124	100%
	12	44		158	158	

Berdasarkan data diatas, terlampauinya target ini akibat adanya penambahan kuota jumlah sekolah yang diikutkan untuk mencapai output satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMK) sebagai tindaklanjut dari percepatan pencapaian target nasional. Penambahan jumlah sekolah ini berasal dari kuota tahun-tahun sebelumnya yang belum terlayani serta didukung oleh ketersediaan dana. Sehingga terjadi penambahan kuota dari 98 sekolah menjadi 124 sekolah.

5. Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output kegiatan Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP

Secara umum rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output kegiatan Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP untuk semua jenjang Pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK seperti dibawah ini:

1. Verifikasi Sekolah Model

Kegiatan dilakukan memilih sekolah model yang akan ditetapkan di tahun 2017 dengan melakukan wawancara, pengisian instrumen, dan kunjungan sekolah. Dari 405 calon sekolah model yang ada, dipilih 288 sekolah berdasarkan hasil instrumen, wawancara, dan kunjungan sekolah. Adanya revisi anggaran menyebabkan jumlah sekolah yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Kepala LPMP Riau sebanyak 192 sekolah.

Kendala yang dihadapi belum adanya instrumen yang terstandar dari Dirjen Dikdasmen untuk memverifikasi apakah sekolah tersebut layak atau tidak

menjadi sekolah model sehingga hasilnya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi: Perlu adanya instrumen yang terstandar dari Dirjen Dikdasmen dengan indikator dan kriteria yang jelas.

2. Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk memberitahukan kepada pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi) terkait penerapan penjaminan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) sesuai permendikbud No. 28 tahun 2016, dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya.

Hasil Kegiatan berupa:

- 1) Kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah dan LPMP untuk menjalankan pengembangan sekolah model dan pengimbasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di daerahnya;
- 2) Pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan daerah;
- 3) Rekomendasi fasilitator daerah untuk penerapan SPMI di sekolah model dan imbas.

Kendala yang dihadapi yaitu jadwal kegiatan bersamaan dengan pelaksanaan ujian sekolah jenjang SMP sehingga pejabat dari dinas banyak yang hanya mengirim perwakilan bahkan ada yang tidak mengirimkan peserta.

Rekomendasi: Penjadwalan sebaiknya mempertimbangkan Kalender Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Bimtek Fasda Sekolah Model

Kegiatan ini melatih Fasilitator Daerah (Fasda) yang telah diusulkan Kab/Kota agar memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan tahapan

penjaminan mutu pendidikan, serta memfasilitasi dan melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan di daerah. Secara umum, fasda memahami tahapan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan siap untuk mendampingi sekolah model dalam penerapan SPMI.

Kendala yang dihadapi: Sulit untuk memenuhi persyaratan tentang kualifikasi Pendidikan yang ditetapkan karena keterbatasan SDM di Riau. Persyaratan kualifikasi pendidikan untuk calon Fasda ditetapkan Ditjen Dikdasmen S-2. Kemampuan penguasaan IT Fasda masih rendah. Sehingga ketika diberi tugas belum bisa menyelesaikan dengan baik.

Rekomendasi Penambahan jumlah calon Fasda yang dimintakan ke Dinas Kabupaten/Kota melebihi kebutuhan Fasda dan disesuaikan dengan persyaratan Fasda serta memiliki kompetensi/penguasaan IT agar mendapatkan Fasda yang berkompeten.

4. Bimtek SPME

Kegiatan ini melatih Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) agar memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan tahapan penjaminan mutu pendidikan, serta memfasilitasi dan melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan di daerah. Hasil yang diharapkan Peserta memahami alur kerja TPMPD mulai dari pembuatan surat keputusan guna pembentukan Tim, Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk simulasi terhadap tugas TPMPD di daerah masing-masing, dan membuat jadwal implementasi untuk pembuatan SK dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Kendala yang dihadapi: Peserta yang datang tidak sesuai persyaratan undangan yaitu pejabat/pemangku kepentingan di daerah sehingga peserta tidak dapat mengambil kebijakan/keputusan untuk membentuk tim TPMPD.

Rekomendasi: Dinas Pendidikan harus mengirimkan peserta sesuai persyaratan yang diminta LPMP.

5. FGD Fasda Sekolah Model

Peserta diberi penguatan materi Penguatan Pendidikan Karakter, lesson studi, model-model pembelajaran dan literasi sehingga dapat mengimplementasikan ke dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan. Kegiatan dilaksanakan dengan pola 7 jam. Peserta memahami materi Penguatan Pendidikan Karakter, lesson studi, model-model pembelajaran dan literasi untuk dapat diimplementasikan ke dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan.

Kendala yang dihadapi kurangnya alokasi waktu untuk pembahasan materi.

Rekomendasi: alokasi waktu pelaksanaan FGD sebaiknya ditambah.

6. Bimtek SPMI ke Kab/Kota

Peserta adalah seluruh sekolah model dengan mengirimkan 4 orang perwakilan untuk setiap sekolah. Dalam kegiatan ini peserta diharapkan bisa memahami kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, cara menerapkan siklus SPMI, pembentukan tim penjaminan mutu sekolah sebagai penanggungjawab aktivitas penjaminan mutu di sekolah, agar peserta dapat melakukan pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain. Pelaksanaan kegiatan dengan pola 32 jam.

Hasil yang diharapkan, peserta memahami siklus SPMI dan bisa menerapkannya dengan menggunakan data rapor mutu sekolah masing-masing.

Kendala: Adanya sebagian sekolah yang lokasinya jauh dari tempat pelaksanaan kegiatan sehingga proses bimbingan teknis kurang efektif.

Rekomendasi: Memberi fasilitas akomodasi serta transportasi bagi peserta yang lokasinya jauh.

7. Pendampingan SPMI oleh Fasda

Pendampingan merupakan tindak lanjut dari bimtek dan dilaksanakan sebanyak 4 kali oleh fasda. Kegiatan yang dilakukan pada pendampingan ini adalah memastikan dan memberikan bimbingan pada sekolah dalam melaksanakan siklus SPMI.

Kendala yang dihadapi: Belum terakomodasinya pendanaan di RKL untuk tim pemantau LPMP sehingga kegiatan ini tidak terpantau oleh LPMP.

Rekomendasi: Penambahan alokasi dana untuk melibatkan pihak LPMP dalam program pendampingan sebagai *quality assurance*.

8. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model

Dilakukan kunjungan langsung ke sekolah model sampel dengan melakukan pengamatan dan pengisian instrumen. Hampir semua sekolah sampel yang dikunjungi sudah berproses dalam menerapkan siklus SPMI.

Kendala: Keterbatasan anggaran mengakibatkan sekolah yang dikunjungi untuk monev sangat terbatas, sehingga data yang diperoleh juga sangat terbatas.

Rekomendasi : sebaiknya monev dilaksanakan di semua sekolah model.

9. Monitoring Pelaporan Penggunaan Bantuan Sekolah Model

Kegiatan dilaksanakan dengan mengumpulkan penanggungjawab penggunaan bantuan pemerintah dari setiap sekolah di satu tempat. Petugas melakukan asistensi terkait pelaporan agar laporan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pada umumnya sekolah sudah membuat laporan penggunaan

dana bantuan pemerintah operasional sekolah model, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan masih banyak yang harus diperbaiki.

Kendala yang dihadapi sebagian peserta ada yang tidak membawa laporan dan peserta yang datang bukan personil yang memahami tentang penggunaan bantuan pemerintah sehingga laporan yang disusun terdapat banyak kekurangan dan harus direvisi.

Rekomendasi sebaiknya petugas yang membuat laporan adalah personil yang memahami tentang penggunaan bantuan pemerintah.

10. Pembinaan Sekolah Model oleh Widyaiswara

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian mutu SNP dengan memberikan fasilitasi untuk melaksanakan program yang dibutuhkan sekolah. Pembinaan dilakukan oleh seorang widyaiswara terhadap 4 sekolah (1 SD, 1 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK) per kabupaten/kota. Hasil yang diharapkan: meningkatkannya capaian mutu SNP sekolah.

Kendala yang dihadapi: kegiatan pembinaan dilakukan kurang maksimal karena waktu dan frekuensi yang tersedia tidak mencukupi sehingga kurang optimal dalam melakukan pembinaan sekolah model. Pola pembinaan belum seragam.

Rekomendasi: Perlu penambahan frekuensi dan jumlah hari efektif kegiatan serta penyeragaman pola pembinaan.

6. Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output kegiatan Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 untuk semua jenjang Pendidikan

Secara umum rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output kegiatan Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 untuk semua jenjang Pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK seperti dibawah ini:

1. Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum 2013

Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai mekanisme dan pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2017.

Dari 90 orang peserta yang diundang, peserta yang hadir sebanyak 84 orang dengan persentase kehadiran sebesar 93,33%.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum 2013 yaitu, tidak semua undangan dari unsur pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bisa hadir, yang hadir dari unsur staff biasa, sehingga koordinasi tidak berjalan lancar. Staf biasa tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan.

Rekomendasi : Perlu peningkatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, agar unsur pimpinan bisa menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi di masa mendatang.

2. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota untuk Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

Tujuan Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk menghasilkan Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota yang kompeten dan siap untuk ditugaskan pada bimbingan teknis guru sasaran dan pendampingan di sekolah sasaran. Dari 1.006 orang peserta yang diundang, peserta yang hadir sebanyak 995 orang dengan persentase kehadiran sebesar 98,91%.

Kendala yang dihadapi adalah, beberapa peserta yang di nilai oleh LPMP Riau bisa dan mampu untuk menjadi IK, ternyata pada saat bersamaan sedang mengikuti kegiatan lain yang di laksanakan oleh Ditjen GTK, di samping itu beberapa peserta yang diundang tidak bisa hadir, sehingga di gantikan oleh peserta lain yang sudah pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tahun sebelumnya.

Rekomendasi : Melakukan koordinasi yang intensif kepada pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk memastikan kemampuan dan kehadiran peserta yang akan diundang.

3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013 Tahun 2017

Kegiatan ini bertujuan untuk Menyamakan persepsi tentang alur kegiatan bimtek guru sasaran di Tempat Pelaksanaan Kegiatan (TPK), Menginformasikan data guru sasaran, narasumber dan panitia untuk kegiatan bimbingan teknis guru sasaran dan menginformasikan pengiriman bahan dan ATK untuk kegiatan. Dari 172 orang peserta yang diundang, peserta hadir sebanyak 172 orang, dengan persentase kehadiran peserta sebanyak 100%

Kendala yang di hadapi adalah beberapa peserta yang diundang tidak bisa hadir dan kuotanya di gantikan oleh staf LPMP.

Rekomendasi : Melakukan koordinasi yang intensif kepada pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk memastikan kehadiran peserta yang akan diundang.

4. Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013 untuk Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Tujuan dari Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013 adalah memfasilitasi kepala sekolah dan guru sasaran sekolah pelaksana Kurikulum 2013 memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kompetensi dalam hal Kurikulum 2013. Dari 5.120 orang guru SD yang diundang, guru SD yang hadir sebanyak 5.119 orang (99,98%), dari 4.356 orang guru SMP yang diundang, guru SMP yang hadir sebanyak 4.313 orang (99,01%), dari 2.664 orang guru SMA yang diundang, guru SMA yang hadir sebanyak 2.531 orang (95,01%), dan dari 1.984 orang guru SMK yang diundang, guru SMK yang hadir sebanyak 1.968 orang (99,19%).

Kendala yang dihadapi adalah : Beberapa peserta yang diundang tidak bisa hadir, sehingga digantikan oleh guru dari sekolah lain, hal ini disebabkan karena kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan bertepatan dengan libur sekolah dan beberapa sekolah tidak memiliki jumlah guru sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, lokasi beberapa sekolah pelaksana kurikulum 2013 sulit untuk melaksanakan kegiatan balik hari, karena tidak ada bantuan penginapan, sehingga peserta kurang disiplin mengikuti materi. Pada saat pelaksanaan ada beberapa IK yang mengundurkan diri sehingga harus digantikan oleh IK lain. Ada IK yang tidak percaya diri menjadi instruktur saat bimbingan teknis.

Rekomendasi: Mengalihkan kuota ke sekolah yang memiliki jumlah guru melebihi kuota yang telah ditetapkan dan memberikan bantuan penginapan bagi sekolah yang lokasinya jauh serta melaksanakan bimbingan teknis di LPMP atau di hotel kabupaten bagi sekolah-sekolah yang lokasinya jauh. Menginformasikan kepada dinas Pendidikan kabupaten/kota terkait tentang ketidakhadiran peserta dari daerahnya diharapkan bagi dinas untuk memperhatikan pemberian izin operasional bagi sekolah yang baru tentang kecukupan guru untuk setiap mapel. Menambah kuota IK untuk mengantisipasi bagi IK yang berhalangan atau tidak mampu menjadi narasumber.

5. Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 untuk Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan informasi tentang Proses dan substansi pendampingan Implementasi Kurikulum; Acuan pembuatan Proposal Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013; Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum; Mekanisme penggunaan Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi. Dari 707 orang peserta yang diundang, peserta hadir semua dengan persentase kehadiran sebesar 100%.

Kendala yang di hadapi adalah beberapa sekolah tidak bisa mengirimkan peserta sesuai kriteria, sehingga banyak peserta yang mengalami kesulitan dalam pembuatan proposal dan pembuatan RAB kegiatan pendampingan. Keterbatasan anggaran dan jumlah IK menyulitkan induk klaster dalam membuat perencanaan kegiatan pendampingan.

Rekomendasi : Melakukan koordinasi yang intensif kepada pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk memastikan kriteria dan kehadiran peserta yang akan diundang, penambahan kuota IK dengan mempertimbangkan lokasi sekolah-sekolah pelaksana Kurikulum 2013.

6. Penyaluran Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Tujuan kegiatan ini adalah menyalurkan dana bantuan pemerintah pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 ke semua sekolah induk klaster. Dana bantuan yang disalurkan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi adalah : Nomor rekening yang dikirim oleh beberapa sekolah ada yang sudah tidak aktif lagi dan rekening beberapa sekolah mengalami kendala dalam sistem SPAN di KPPN.

Rekomendasi : Meminta sekolah untuk mengirimkan nomor rekening yang masih aktif dan LPMP diharap segera memastikan keabsahan nomor rekening dalam system SPAN.

7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 adalah untuk mengetahui informasi mengenai Penyusunan Proposal yang dilakukan oleh sekolah pelaksana Kurikulum 2013; Penyaluran dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013; Evaluasi proses pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013; Penyusunan Kelengkapan Bahan Pelaporan; Pengetahuan terhadap Kurikulum 2013; Pelaksanaan Pendampingan; Perubahan terhadap kemampuan Implementasi Kurikulum 2013; Pendapat tentang Buku Kurikulum 2013; Upaya-upaya sekolah dalam Implementasi KTSP sesuai Kurikulum 2013; Hal-hal yang dilakukan setelah diterapkannya Kurikulum 2013 di sekolah; Proses Penilaian Pendidikan; Dampak Kurikulum 2013; dan Masukan dan Saran untuk perbaikan pelaksanaan di masa mendatang. Dari 287 sekolah yang menjadi responden kegiatan monev ini, petugas monev bisa menjangkau data dari semua sekolah responden.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah : Beberapa sekolah memiliki lokasi yang jauh dan sulit, sementara waktu pelaksanaan tugas dibatasi selama 3 hari, sehingga instrumen tidak bisa langsung dibawa pulang.

Rekomendasi : Penambahan waktu pelaksanaan tugas bagi petugas di daerah lokasi yang sulit terpencil. Membuat aplikasi monev yang mudah diakses oleh responden dan kemudian melakukan validasi data yang diisi oleh responden.

8. Workshop Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan peserta pengetahuan kepada sekolah induk klaster pelaksana Kurikulum 2013 tentang Substansi dan akuntabilitas pendampingan implementasi Kurikulum 2013; Mekanisme penyaluran dan penggunaan Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013; Sistematis pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013. Dari 705 orang peserta yang diundang, peserta yang hadir sebanyak 705 orang dengan persentase 100%

Kendala yang dihadapi adalah , beberapa sekolah mengirimkan peserta yang tidak sesuai kriteria sehingga proses penyusunan laporan kegiatan pendampingan dan laporan penggunaan dana bantuan mengalami kendala dan beberapa sekolah tidak membawa berkas yang diminta.

Rekomendasi : Koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah agar mengirimkan peserta sesuai kriteria yang diundang dan membawa berkas yang diminta.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017 realisasi anggaran LPMP Riau sebesar Rp. 52.499.080.540,- dari total pagu sebesar Rp. 54.018.559.000,- atau 97,19%. Dihitung dari besaran anggaran yang tidak terealisasi adalah Rp. 1.519.478.460,-. Adapun yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran adalah adanya efisiensi pada saat mengeksekusi kegiatan. Kendala teknis lainnya hanya beberapa hal kecil, seperti keluarnya output dari Dirjen Dikdasmen yang merupakan input untuk

kegiatan LPMP Riau adalah di akhir tahun anggaran, sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Tabel 3.37. Penyerapan Anggaran Per Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Alokasi	Realisasi	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya		2.327.607.000	2.223.836.733	95.54
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya Output : SD Yang Terpetakan Mutunya	1.551.597.000	1.473.734.691	95.00
	2	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya Output : SMP Yang Terpetakan Mutunya	471.841.000	455.273.661	96.50
	3	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya Output : SMP Yang Terpetakan Mutunya	181.995.000	179.584.691	98.70
	4	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya Output : SMP Yang Terpetakan Mutunya	122.174.000	115.243.690	94.33
	Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP		34.961.663.000		
	5	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi	14.527.323.000	14.462.815.955	99,56

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi	Realisasi	%
	dalam pencapaian SNP	1.626.820.000	1.595.737.000	
	Output :	12.900.503.000	12.867.078.955	98,10
	- SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP			99,74
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 (SD)			
	6 Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	9.550.955.000	9.524.970.400	99,73
	Output :	1.027.467.000	1.021.272.000	99,40
	- SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	8.523.488.000	8.503.698.400	99,77
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 (SMP)			
	7 Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	6.051.019.000	6.004.112.350	99,33
	OutPut :	727.787.000	723.401.000	99,40
	- SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	5.323.232.000	5.280.711.350	99,22
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 (SMA)			
	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi	4.832.356.000	4.749.445.119	93,28

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi	Realisasi	%
	dalam pencapaian SNP	727.788.000	723.401.855	
	Output :	4.104.568.000	4.026.043.264	99,40
	- SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP			98,09
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)			

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pesentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikan dari alokasi Rp. 1.551.597.000 dengan realisasi 1.777.266.745 atau 95%
2. Persentase SMP yang telah dipetakan peta mutu pendidikan dari target Rp. 471.841.000 dengan realisasi Rp 455 273 661 atau 96,5%
3. Persentase SMA yang telah dipetakan peta mutu pendidikan dari target Rp.181.995.000 dengan realisasi Rp 179.584.691 atau 98,7%
4. Persentase SMK yang telah dipetakan peta mutu pendidikan dari target Rp 122.174.000 dengan realisasi Rp 115243690 atau 94,3%
5. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari target Rp 14.527.323.000 dengan realisasi 14.462.815.955 atau 99,56%
6. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP dari target Rp 9.550.955.000 dengan realisasi Rp 9.524.970.400 atau 99,73%.
7. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP dari target Rp 6.051.019.000 dengan realisasi Rp 6.004.112.350 atau 99,22%
8. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP dari target Rp. 4.832.356.000 dengan realisasi Rp 4.749.445.119 atau 98,28%

Tabel 3.38. Capaian Realisasi Anggaran Per Indikator/Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	REALISASI	%
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	2.327.607.000	2.223.836.733	95,54
		2. Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP	34.961.653.000	34.741.343.824	99,37

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan :

1. Untuk indikator Persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya, LPMP Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.327.607.000 dengan realisasi Rp 2.223.836.733 atau 95,54%. Anggaran tersebut tersebar pada 7 (tujuh) kegiatan yaitu : (1) Bimtek Fasilitator daerah Pengumpulan data, (2) Bimbingan Teknis Pengawas, (3) Pelaksanaan Pengumpulan data, (4) Verifikasi dan validasi, (5) Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu, (6) Analisis data Mutu, (7) Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu.
2. Untuk indikator Persentase Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, LPMP Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 34.961.653.000,- dengan realisasi sebesar Rp , 34.741.343.824,- atau 99,37% yang didukung oleh tiga kegiatan utama. Ketiga kegiatan utama tersebut adalah:
 1. Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Pelatihan fasilitator daerah SPMI, Pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di Daerah;

2. Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang terdiri dari penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013;
3. Pemberian bantuan operasional sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya, terdiri dari Pendampingan sekolah model oleh Fasilitator Daerah.

Selain dua sasaran strategis di atas, LPMP Riau mengalokasikan anggaran untuk keperluan pengembangan lembaga, berupa pengelolaan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan yang didukung oleh beberapa output sebagaimana dalam tabel 3.28

Tabel 3.39. Capaian realisasi anggaran LPMP Riau

NO.	OUTPUT	ALOKASI DANA	REALISASI	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.533.518.000	1.399.011.589	91,23
2	Layanan Internal	4.972.877.000	4.528.071.119	91,06
3	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.276.788.000	1.166.812.932	91,39
6	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.515.440.000	1.304.679.000	86,09
5	Layanan Perkantoran	10.222.904.000	9.606.817.275	93,97

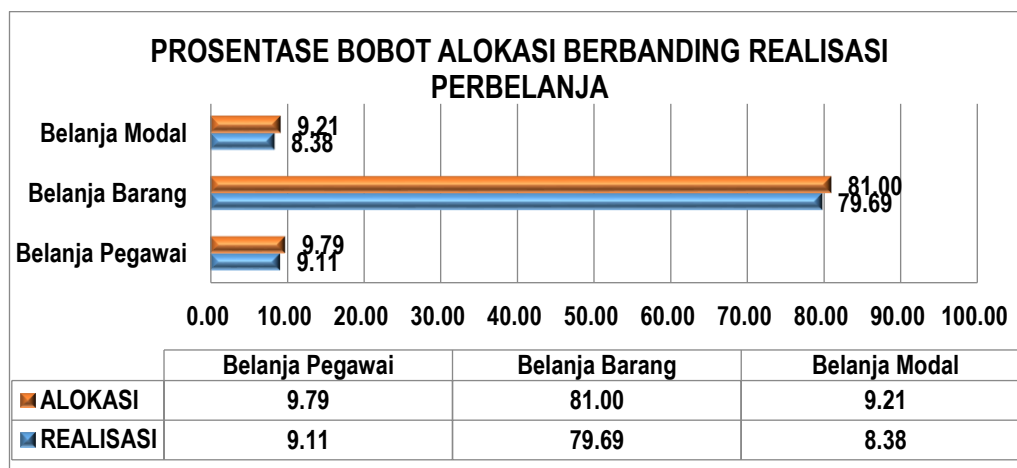
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran LPMP Riau sampai desember 2017 adalah Rp 52.499.080.540,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau 97,19% dari total anggaran Rp 54.018.559.000,- (lima puluh empat milyar delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Selanjutnya terdapat 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang

meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.

Tabel 3.40 Komposisi anggaran pos belanja LPMP Riau

Kode	Jenis Belanja	Alokasi	BBT	Realisasi		
				31 Desember	BBT	%
51	Belanja Pegawai	5,290,279	9.79	4,923,029	9.11	93.06
52	Belanja Barang	43,755,403	81.0	43,047,981	79.69	98.38
53	Belanja Modal	4,972,877	9.21	4,528,071	8.38	91.06
	Jumlah	54,018,559	100	52,499,081	97.19	97.19



Grafik 3.17. Bobot Alokasi Berbanding Realisasi Belanja

Dari table di atas, pada tahun 2017 LPMP Riau mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 5.290.279.000,- atau 9,21% dari total anggaran DIPA LPMP Riau. Anggaran ini terealisasi sebesar 93,06% atau Rp. 4.923.029.000,- (8,38% dari total anggaran DIPA LPMP Riau).

Untuk belanja barang, LPMP Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43.755.403.000 atau 81% dari total DIPA LPMP Riau. Anggaran ini terealisasi sebesar 98,38% atau Rp 43.087.981.000,- (79,69% dari total anggaran DIPA LPMP Riau).

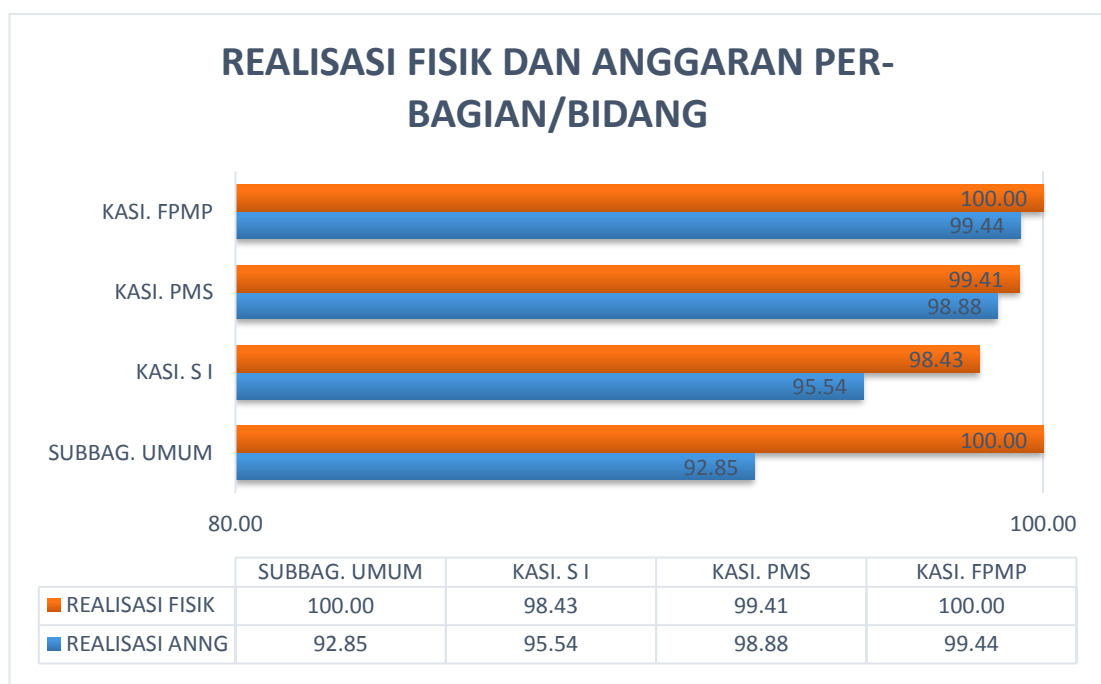
Sedangkan alokasi pada belanja modal, LPMP Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.972.877.000,- atau 9,21% dari total DIPA LPMP Riau. Anggaran ini

terrealisasi sebesar Rp 4.528.071.000,- atau (91,06% dari taotal anggaran DIPA LPMP Riau)

Sedangkan peyerapan anggaran masing-masing bagian di LPMP Riau dapat dilihat pada table beriku :

Table 3.41 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Bagian LPMP Riau

NO	BAGIAN/BIDANG	ALOKASI	%	REALISASI		
				31 Desember	% KEU	% FISIK
1	SUBBAG. UMUM	16,729,299.000	39,97	15,533,900	92.85	100.00
2	SEKSI S I	2,327,607.000	4,31	2,223,837	95.54	98.43
3	SEKSI PMS	4,109,862.000	7,61	4,063,812	98.88	99.48
4	SEKSI FPMP	30,851,791.000	57,11	30,677,532	99.44	100.00
	Jumlah	54,018,559 .000	100	52,499,081	97.19	99.45



Grafik 3.18. Realisasi Fisik dan Anggaran Per Bagian / Bidang

Dapat pula dijabarkan alokasi anggaran per jenis belanja LPMP Riau, dimana alokasi terbesar terdapat di Seksi FPMP yaitu Rp 30.851.791.000,- atau 57.11%, kemudian Subbag Umum sebesar Rp 16.729.299.000,- atau 30,97%, menyusul

seksi PMS sebesar RP 4.109.862.000,- atau 7,61% dan terkecil adalah Seksi Si sebesar RP 2.327.607.000,- atau 4,31%.

secara umum akuntabilitas keuangan LPMP Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pagu awal LPMP Riau Rp. 60.009.861.000,- (enam puluh milyar Sembilan juta delapan ratus enampuluh satu ribu rupiah)
2. DIPA LPMP Riau telah direvisi sebanyak tujuh kali dengan jumlah DIPA terakhir adalah Rp 54.018.559.000,- (lima puluh empat milyar delapan belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
3. Realisasi keuangan sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp 52,499,080,540,- (lima puluh empat milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau 97,19%

Dari keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Jawa Riau, baik penyerapan anggaran maupun fisik pada tahun 2017 perkembangannya dapat dilihat dari Aplikasi dengan alamat <http://molk.kemdikbud.go.id/> yang secara konsisten telah dilaporkan ke Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikdasmen melalui Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Riau tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Riau kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Riau pada tahun 2017.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Riau telah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Riau berhasil merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis LPMP Riau.

Adapun capaian kinerja LPMP Riau memfokuskan pada rencana pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan di Provinsi Riau dengan hasil capaian kinerja yang diukur dengan 2 cara, yakni:

1. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan renstra LPMP Riau tahun 2015-2019, dan
2. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan *output* dalam DIPA LPMP Riau.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya LPMP Riau pada tahun 2017 mendapatkan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar Rp. 54.018.559.000,-(lima puluh empat milyar delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 52.449.080.540,- (lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)

atau sebesar 97.19% dengan sisa anggaran adalah sebesar Rp.1.519.478.460,- (satu milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)..

Dari LAKIP yang telah dilaporkan LPMP Riau, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sisa anggaran yang tidak terealisasi dengan baik oleh LPMP Riau pada tahun anggaran 2017 karena beberapa hal seperti petunjuk teknis kegiatan dari pusat tidak dapat diperoleh oleh LPMP Riau pada awal tahun anggaran, bahkan ada beberapa input kegiatan LPMP Riau yang berasal dari output pusat diterima pada akhir tahun anggaran, sehingga tidak dapat terlaksana secara keseluruhan;
2. *Trust* terhadap lembaga dan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* masih belum terbina dengan baik dan maksimal baik kuantitas maupun kualitas, terutama dengan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga kadang-kadang otonomi daerah yang menjadi tantangan kinerja lembaga masih menjadi halangan besar;
3. Dukungan dan kerjasama seluruh pegawai belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, masih terdapat sentralistik kegiatan berada di masing-masing seksi/subbagian. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak dipahami secara komprehensif oleh seluruh pegawai;
4. Optimalisasi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP belum terlaksana secara keseluruhan;
5. Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2017 masih secara parsial dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan program tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 merupakan landasan yang kuat bagi LPMP Riau untuk melaksanakan program-program pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting

lainnya LPMP Riau harus menetapkan langkah strategis, seperti: berkesinambungan, perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.

B. Rekomendasi

1. Agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dan maksimal diawal tahun sebaiknya Petunjuk Teknis kegiatan dari pusat lebih awal diberikan kepada LPMP.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* agar kegiatan lebih terlaksana dengan baik dan maksimal baik kuantitas maupun kualitas.
3. Perlunya dukungan dan kerjasama seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan lebih baik.
4. Berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indicator kinerja LPMP;
5. Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2017 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan program tahun berikutnya.

C. Rekomendasi

1. Agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dan maksimal diawal tahun sebaiknya juknis kegiatan dari pusat lebih awal diberikan kepada LPMP.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan atau *stackholder* agar kegiatan lebih terlaksana dengan baik dan maksimal baik kuantitas maupun kualitas.
3. Perlunya dukungan dan kerja sama seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan lebih baik.

4. Berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indicator kinerja LPMP;
5. Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2017 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan program tahun berikutnya.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kepala LPMP Riau
Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah**

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Pemetaan Mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

TARGET CAPAIAN

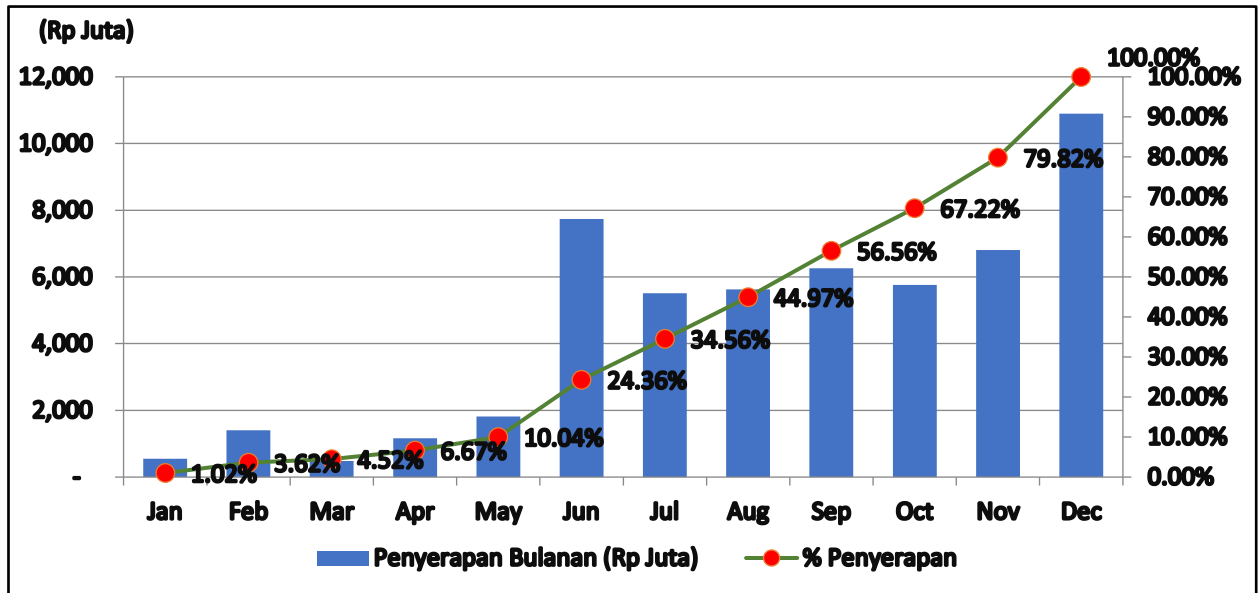
PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah
KEGIATAN : Pembinaan penjaminan mutu pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	SD, SMP, SMA, SMK	2.707.447.000
	1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100 %	1.804.801.321
	2. Persentase SD yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SD)</i>	40 % 3.683 Sekolah	
	3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100 %	548.839.935
	4. Persentase SMP yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SMP)</i>	50 % 1.120 Sekolah	
	5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100 %	211.695.403
	6. Persentase SMA yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SMA)</i>	60 % 432 Sekolah	
	7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	100 %	142.110.341
	8. Persentase SMK yang telah meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutunya (SMK)</i>	50 % 290 Sekolah	
	Persentase Satuan Pendidikan yang telah di supervisi dan fasilitasi berdasarkan 8 SNP	SD, SMP, SMA, SMK	34.961.663.000
	13. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - <i>Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SD)</i>	40 % 76 Sekolah	14.873.241.560 1.626.820.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	- Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)	1.280 Sek	12.900.503.000
	14. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMP) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)	40 % 72 Sekolah 396 Sekolah	9.509.857.280 1.027.467.000 8.523.488.000
	15. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMA) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)	40 % 42 Sekolah 148 Sekolah	2.953.540.970 727.787.000 5.323.232.000
	16. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (SMK) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)	40 % 42 Sekolah 123 Sekolah	4,679,950,080 727.788.000 4.104.568.000

Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan Pembinaan penjaminan mutu pendidikan adalah sebesar 54.018.559.000 (lima puluh empat milyar delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 LPMP Riau



No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Penyerapan Bulanan (Rp juta)	551	1,404	486	1,161	1,820	7,735	5,510	5,623	6,261	5,758	6,806	10,901
2	Penyerapan Kumulatif	551	1,955	2,442	3,603	5,423	13,159	18,669	24,292	30,553	36,311	43,118	54,019
3	% Penyerapan	1.02	3.62	4.52	6.67	10.04	24.36	34.56	44.97%	56.56	67.22	79.82	100.00

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Dikdasmen,

Jakarta, Desember 2017
Kepala LPMP Riau

Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D
Nip. 195905121983111001

Drs. Mulyatsyah, M.M
Nip. 196407141993041001

